



KATALOG BPS.

---

# **PROFIL NUTRISI 2005**

<http://www.bps.go.id>

---

*BPS* **Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia**

**PROFIL NUTRISI  
2005**

<http://www.bps.go.id>

*BPS* Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

# **PROFIL NUTRISI 2005**

**No. Publikasi:** 05330.

**Ukuran Buku:** 21,59 X 27,94 Cm

**Jumlah Halaman:** 60 halaman

**Naskah:**

Sub Direktorat Statistik Pendapatan Tenaga Kerja

**Diterbitkan Oleh:**

Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

**Dicetak Oleh:**

*Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya*

## **Tim Penyusun**

Peneliti Utama : Uzair Suhaimi

Asisten Peneliti :

1. Dendi Romadhon
2. Syafi'i Nur
3. Agus Prasetyo

Pengolah Data :

1. Ahmad Azhari (Koordinator)
2. Dani Jaelani
3. Siti Muchlisoh

## Pengantar

Publikasi ini menyajikan profil nutrisi/gizi penduduk Indonesia, hasil pemotretan situasi obyektif di lapangan berdasarkan berbagai sumber data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi dimaksudkan untuk mengisi kekosongan informasi bersifat mendasar mengenai situasi gizi yang selama ini agak terabaikan. Informasi yang dimaksud terkait dengan berbagai ukuran mengenai besar masalah gizi yang dihadapi, kecenderungan antar waktu, serta sebarannya antar wilayah.

Semula, sesuai TOR, profil ini direncanakan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005 untuk memperoleh gambaran situasi terkini. Tetapi karena berbagai hambatan teknis di lapangan, sumber data itu sejauh ini belum siap untuk dimanfaatkan untuk keperluan ini. Oleh karena itu publikasi ini menggunakan sumber data lain sebagai sumber data utama, khususnya Susenas tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa publikasi ini dapat direalisasikan karena partisipasi berbagai pihak. Kami menghargai partisipasi dari masing-masing mereka itu. Kepada pemakai data kami berharap agar publikasi dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan dalam mengkaji masalah terkait-gizi serta menyusun kebijakan yang relevan sebagai upaya sadar untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Akhirnya, demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang, kami berharap dan menghargai setiap komentar dan saran konstruktif dari pihak mana pun.

Jakarta, Desember 2005

Badan Pusat Statistik  
Kepala,



Dr. Choiril Maksum  
NIP. 340003890

<http://www.bps.go.id>

## Ringkasan Eksekutif

Di Indonesia masih terdapat masalah gizi tetapi informasi mendasar seperti besarnya masalah itu dan sebarannya antar wilayah sejauh ini belum tersedia. Laporan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan itu dan mencakup topik-topik terkait dengan ketersediaan sumber energi, status gizi balita, dan kecukupan asupan energi.

### Ketersediaan Sumber Gizi

Sumber utama persediaan beras sebagai bahan konsumsi makanan pokok masyarakat yang utama berasal dari produksi dalam negeri. Sumber yang berasal dari impor porsinya relatif kecil walaupun peranannya cenderung meningkat. Produksi beras dalam negeri cenderung tidak meningkat secara signifikan dan hal ini mungkin sedikit banyak terkait dengan kebijakan impor beras yang kurang kondusif bagi masyarakat petani untuk menanam padi secara optimal.

Peranan beras sebagai sumber gizi sangat besar, tidak hanya dalam hal penyediaan sumber energi, tetapi juga sumber protein. Pada tahun 2002, beras menyumbang sekitar 47.2 persen sumber energi dan 45.8 persen sumber protein. Kedua angka itu mengindikasikan masih rendahnya diversifikasi tanaman makanan pokok dan sumber protein hewani untuk konsumsi makanan masyarakat Indonesia. Sebenarnya tersedia sumber gizi (khususnya energi) dalam jumlah yang memadai. Tahun 2002, misalnya, tersedia sumber energi sekitar 3,000 kkal per kapita per hari, 1,000 kkal lebih tinggi dari angka acuan kecukupan energi seseorang.

### Status Gizi Balita

Status gizi balita relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari relatif besarnya proporsi balita yang berstatus gizi kurang bahkan buruk. Pada tahun 2003, misalnya, proporsi balita yang bergizi kurang 18.3 dan yang bergizi buruk 7.5 persen. Status gizi balita lebih tinggi di daerah perkotaan dari pada di pedesaan. Pada tahun 2003, proporsi balita bergizi kurang 16.8 persen di daerah perkotaan dan 19.5 persen di daerah pedesaan.

Status gizi balita meningkat dari tahun 2001 ke tahun 2002, tetapi tahun berikutnya kembali menurun. Proporsi yang berstatus gizi kurang dan buruk



(Zscore < -2) pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-masing 26.6, 25.8 dan 28.7 persen. Pola itu berlaku hampir di semua provinsi. Status gizi balita bervariasi antar provinsi. Proporsi balita yang bergizi kurang dan buruk memiliki rentang antara 16.6 persen untuk Provinsi Bali dan 46.2 persen untuk provinsi Gorontalo. Status gizi balita terkait dengan kemiskinan walaupun yang terakhir ini bukan satu-satunya faktor berpengaruh.

### **Asupan Energi**

Secara rata-rata, penduduk Indonesia telah memenuhi asupan energi minimal yang diperlukan. Asupan energi per kapita per hari pada tahun 2002, misalnya, sekitar 2,300 kkal, atau 200 kkal lebih tinggi dari angka kebutuhan normal. Angka asupan energi lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Pada tahun 2002, misalnya, asupan energi per kapita sekitar 2,281 kkal di daerah perkotaan dan 2,373 kkal di pedesaan. Angka-angka itu sama sekali tidak mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah terbebas dari masalah kurang gizi. Prevalensi penduduk yang bergizi kurang (asupan energi kurang dari 2,100 kkal) atau bahkan sangat kurang (kurang dari 1,700 kkal) relatif masih tinggi. Pada tahun 2002 sekitar 37.4 persen penduduk yang bergizi kurang dan 14.1 persen bergizi sangat kurang. Prevalensi penduduk kurang gizi bervariasi antar wilayah. Pada tahun 2002 rentang proporsi bergizi sangat kurang terletak antara 5.9 persen untuk Provinsi Bali dan 20.6 persen untuk Provinsi Dista Yogyakarta.

Prevalensi kurang gizi terkait dengan berbagai faktor sosial-ekonomi: cenderung lebih rendah bagi penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi sebagaimana terlihat pada golongan pendapatan rumah tangga. Sebagai ilustrasi, asupan energi sekitar 1,900 kkal bagi rumah tangga berpendapatan paling rendah dan sekitar 2,500 bagi yang berpendapatan paling tinggi.

Asupan energi ternyata tidak berkorelasi dengan status gizi balita. Kedua indikator itu mengukur dua aspek gizi yang berbeda. Ini berarti antara keduanya tidak dapat saling menggantikan. Status gizi balita mencerminkan keadaan lebih kompleks dari sekedar kecukupan gizi secara umum dalam rumah tangga.

## Daftar Isi

	<u>Halaman:</u>
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
<b>Bab Satu    Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Tujuan Laporan	2
1.3    Sistematika Laporan	3
<b>Bab Dua    Sumber Data dan Metodologi</b>	<b>5</b>
2.1    Sumber Data	5
2.2    Ukuran yang Digunakan	5
<b>Bab Tiga    Ketersediaan Sumber Gizi</b>	<b>9</b>
3.1    Produksi Padi	9
3.2    Impor Beras	10
3.3    Ketersediaan Unsur Gizi	11
<b>Bab Empat    Status Gizi Balita</b>	<b>19</b>
4.1    Tren Status Gizi	19
4.2    Perbandingan Antar Wilayah	20
4.3    Status Gizi, AKB dan Kemiskinan	21
<b>Bab Lima    Asupan Energi</b>	<b>29</b>
5.1    Gambaran Umum	29
5.2    Perbandingan Antar Provinsi	30
5.3    Prevalensi Penduduk Kurang Gizi	31

	<u>Halaman:</u>	
5.4	Faktor Sosial-Ekonomi	32
<b>Bab Enam</b>	<b>Kesimpulan</b>	43
6.1.	Ketersediaan Sumber Gizi	43
6.2	Status Gizi Balita	44
6.3	Asupan Energi	44
<b>Tabel-Tabel Lampiran</b>		
Tabel L-1	Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi, 2001	49
Tabel L-2	Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi, 2002	50
Tabel L-3	Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi, 2003	51
<b>Referensi</b>		52
<b>Gambar Lampiran</b>		
1	Asupan Energi per Kapita/hari, 2002 (dalam Kilo Kkal)	41
<b>Gambar Peta</b>		
Peta 1	Anak Balita dengan Gizi Kurang (< -2 SD di Indonesia menurut Kabupaten/Kota, 2002	27
Peta 2	Penduduk dengan Kekurangan Energi dan Protein Kurang dari 1 700 kkal di Indonesia menurut Kabupaten/Kota, 2002	36

## Daftar Tabel

	<u>Halaman:</u>
Tabel 3.1a	Produksi Padi menurut Pulau/Provinsi (000 ton) 13
Tabel 3.1b	Produksi Padi dan Beras serta Komponen Pemakaiannya, 2002 14
Tabel 3.1c	Tren Produksi dan Impor Beras 1984-2003 15
Tabel 3.2	Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak per Kapita/Hari dari Beras dan dari Semua Bahan Makanan 17
Tabel 4.1	Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi dan Tipe Daerah, 2001-2003 22
Tabel 4.2	Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang atau Buruk, 2001-2003 24
Tabel 4.3	Tipologi Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Angka Kemiskinan dan Angka Kematian Bayi 26
Tabel 5.1	Asupan Energi ( <i>energy intake</i> ) per Kapita/Hari, 2002 33
Tabel 5.2	Asupan Energi per Kapita/Hari menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2002 (Tertimbang Umur dan Jenis Kelamin) 34
Tabel 5.3	Persentase Penduduk dengan Asupan Energi Kurang dan Sangat Kurang, 2002 37
Tabel 5.4	Asupan Energi per Kapita/Hari menurut Beberapa Karakteristik Sosial-Ekonomi (Kasus Jawa Timur) (kkal) 40

## Daftar Gambar

	<u>Halaman:</u>
Gambar 3.1.a	Produksi Padi Indonesia menurut Pulau (000 ton) 13
Gambar 3.1.b	Proporsi Produksi Padi Pulau Jawa terhadap Produksi Padi Nasional (%) 14
Gambar 3.1.c	Tren Impor Beras Indonesia (000 ton) 16
Gambar 3.1.d	Tren Impor terhadap Produksi Beras (%) 16
Gambar 3.1.e	Ketersediaan Protein Nabati dan Hewani per Kapita/Hari (Gram) 18
Gambar 3.1.f	Ketersediaan Lemak Nabati dan Hewani per Kapita/Hari (Gram) 18
Gambar 4.1	% Balita menurut Status Gizi, 2001-2003 23
Gambar 4.2	% Balita Berstatus Gizi Kurang atau Buruk menurut Tipe Daerah, 2001-2003 23
Gambar 4.3	% Balita Berstatus Gizi Kurang atau Buruk menurut Tipe Daerah, 2003 25
Gambar 4.4	Angka Kematian Bayi (AKB) V.S Balita Gizi Buruk (Kasus Kecamatan Jawa Tengah) 28
Gambar 4.5	Kemiskinan dan Kematian Bayi (Kasus Kecamatan di Jawa Timur) 28
Gambar 5.1	Asupan Energi per Kapita/Hari, 2002 35
Gambar 5.2	Persentase Penduduk dengan Asupan Energi Kurang dan Sangat Kurang, 2002 38
Gambar 5.3	Balita Gizi Buruk V.S Asupan Energi (Kasus Kecamatan Jawa Tengah) 39
Gambar 5.4	Kemiskinan dan Asupan Energi (Kasus Kecamatan di Jawa Timur) 39

## **Bab Satu** **Pendahuluan**

Kasus busung lapar yang telah dilansir secara luas dan agak provokatif oleh berbagai media masa selama beberapa minggu pertengahan tahun 2005 memberikan pesan yang kuat dan sangat jelas: ada masalah gizi di Indonesia. Namun pertanyaan dasar belum terjawab secara memuaskan: (1) seberapa besar masalah itu, (2) bagaimana perubahannya antar waktu, dan (3) wilayah mana di negeri ini yang tergolong rawan gizi. Laporan ini dimaksudkan sebagai upaya awal untuk mengisi kekosongan informasi yang bersifat mendasar itu. Laporan ini menyajikan profil atau gambaran umum kondisi dan status gizi masyarakat Indonesia berlandaskan sejumlah bukti empiris. Laporan juga membahas sebaran geografis profil gizi dan mengidentifikasi berbagai faktor berpengaruh sejauh datanya tersedia. Sumber data yang utama digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Bab ini menyajikan latar belakang, tujuan, dan sistematika laporan. Bagian akhir Laporan ini menyajikan sejumlah tabel lampiran sebagai pelengkap.

### 1.1 Latar Belakang

Berkat pemberitaan secara luas di berbagai media masa mengenai isu busung lapar dan isu-isu terkait, tampaknya kini timbul kesadaran umum mengenai masalah gizi masyarakat. Hal ini antara lain ditengarai oleh peristiwa pemanggilan gubernur sehubungan dengan masalah ini pada pertengahan 2005. Peristiwa itu sama sekali tidak berlebihan karena masalah gizi, salah satu aspek dari masalah pangan, menyangkut kehidupan masyarakat yang bersifat mendasar dan eksistensial: kelangsungan hidup seseorang dapat terancam karena kekurangan gizi yang bersifat kronis. Ironisnya, kelompok masyarakat yang paling terancam oleh kekurangan gizi justru yang paling penting bagi masa depan bangsa yaitu anak-anak.

Mengatasi masalah gizi di Indonesia sama sekali bukan perkara yang mudah karena masalahnya besar dan kompleks. Masalahnya besar karena berkaitan dengan penduduk yang berjumlah besar yang tersebar di sekitar 30 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten/kota dengan berbagai tingkat pembangunan, sumber daya manusia dan sumber daya alam, budaya dan adat-istiadat lokal, serta

lingkungan geografis yang sangat beragam. Masalahnya sangat kompleks karena status gizi dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor lainnya dengan pola hubungan yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Status gizi jelas dipengaruhi tingkat ketersediaan dan ketahanan pangan suatu wilayah, tetapi juga oleh “pola makan” masyarakat yang dipengaruhi latar belakang sosial-ekonomi, tradisi serta budaya setempat. Status gizi, pada gilirannya, mempengaruhi status kesehatan, produktivitas kerja, kelangsungan hidup anak (*child survival*), serta daya-serap seorang peserta-didik dalam menerima pelajaran di ruang kelas. Kalimat terakhir mengilustrasikan bagaimana upaya pembangunan gizi secara keseluruhan dapat secara sinergis membantu keberhasilan upaya bidang-bidang lain.

Masalah gizi dapat ditilik dari berbagai sisi: dari ketersediaan pangan, kemampuan daya beli masyarakat untuk menjangkau harga pangan, asupan gizi (*nutrient intake*), dan berat badan penduduk berumur kurang dari lima tahun (balita) yang dinilai peka menggambarkan status gizi kelompok umur itu tetapi juga status gizi masyarakat secara keseluruhan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan tilikan kritis mengenai beberapa aspek dari masalah gizi itu.

## 1.2 Tujuan Laporan

Secara umum tujuan penulisan Laporan ini adalah menyajikan profil gizi penduduk Indonesia secara agak menyeluruh. Secara khusus tujuannya adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- Apakah ketersediaan bahan makanan yang merupakan sumber gizi masyarakat yang utama jumlahnya memadai? Bagaimana perkembangannya antar waktu?
- Bagaimana status gizi masyarakat Indonesia dilihat dari kelompok masyarakat yang dianggap paling rawan yaitu penduduk berumur kurang dari lima tahun (balita)? Bagaimana variasinya antar provinsi dan atau unit wilayah lain? Adakah kira-kira faktor yang memberikan penjelasan terjadinya variasi antar wilayah?
- Bagaimana status gizi masyarakat dilihat dari kecukupan asupan gizi (*nutrient intake*)? Provinsi mana saja yang tergolong rawan dilihat dari kecukupan itu? Apa sajakah faktor-faktor umum yang menyebabkan timbulnya variasi antar wilayah?

Disadari bahwa sangatlah tidak sederhana untuk memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Jawaban yang tercantum dalam Laporan ini bersifat eksploratif, umum dan dalam pengertian tertentu masih sementara (belum definitif). Sejumlah penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mencapai jawaban yang lebih memadai.

### 1.3 Sistematika Laporan

Bab berikut, Bab Dua, membahas prosedur bagaimana tujuan Laporan ini dipenuhi. Pada bab ini dibahas, antara lain, sumber data utama, dalam arti diolah secara intensif dan ekstensif, yang digunakan dalam analisis profil gizi ini. Bab ini juga membahas ukuran-ukuran status gizi yang digunakan, serta alasan di belakang penggunaan. Sebelum memasuki tema utama laporan ini yaitu status, pada Bab Tiga dibahas terlebih dahulu isu terkait dengan ketahanan pangan yaitu ketersediaan sumber makanan utama masyarakat.

Bab Empat membahas berbagai aspek status gizi balita dilihat dari berat-umur anak, dihitung berdasarkan pendekatan antropometrik yang baku. Bab Lima membahas status gizi masyarakat serta berbagai aspeknya tetapi dilihat dari kecukupan asupan gizi khususnya energi. Bab Enam, bab terakhir, merangkum hasil diskusi pada bab-bab sebelumnya. Bab terakhir ini juga menyajikan beberapa rumusan saran kebijakan umum ke arah perbaikan status gizi masyarakat.



<http://www.bps.go.id>

## **Bab Dua**

### **Sumber Data dan Metodologi**

#### 2.1 Sumber Data

Seperti disinggung dalam Kata Pengantar, dalam rencana awal, Laporan ini memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005, Susenas terakhir, sebagai sumber data utama. Sumber data itu diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai status gizi masyarakat Indonesia. Tetapi karena data survei itu belum tersedia maka Laporan ini mengandalkan Susenas 2002 dan 2003 sebagai sumber data yang utama. Modul konsumsi dari survei itu digunakan untuk keperluan penghitungan asupan energi (*energy intake*), salah satu indikator status gizi sebagaimana akan dijelaskan nanti. Penghitungan itu dimungkinkan karena modul Susenas itu, mungkin satu-satunya survei besar, menanyakan konsumsi makanan rumahtangga sampel secara rinci. Susenas modul ini hanya mencakup sekitar 65,000 rumahtangga seluruh Indonesia sehingga estimasinya hanya diperoleh sampai pada level provinsi.

Susenas 2002 juga mengumpulkan informasi berat badan anak yang berumur kurang dari lima tahun (balita) dengan cara menimbang secara langsung (jadi bukan data retrospektif atau berdasar pengakuan responden). Laporan ini memanfaatkan data yang diperoleh dari survei itu untuk mengukur status gizi khusus balita menggunakan pendekatan baku (dijelaskan berikut).

Selain Susenas, Laporan ini juga memanfaatkan sumber data lain terutama Neraca Bahan Makanan (NBM) berbagai tahun. NBM merupakan publikasi bersama Departemen Pertanian-BPS. Data itu dimanfaatkan untuk melihat sisi ketersediaan sumber gizi masyarakat Indonesia khususnya beras.

#### 2.2 Ukuran yang Digunakan

Dalam Laporan ini istilah gizi merujuk pada zat makanan yang diperlukan dalam jumlah tertentu oleh manusia agar dapat hidup sehari-hari secara normal

yang mencakup tiga unsur yaitu energi, protein dan lemak<sup>1</sup>. Unsur energi yang biasanya diukur dengan kalori merupakan kebutuhan yang paling primer yang diperlukan bukan hanya untuk kegiatan sehari-hari tetapi juga untuk keperluan yang lebih “eksistensial” yaitu berfungsinya organ-organ tubuh secara normal. Unsur protein merupakan unsur kedua terpenting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel tubuh yang sudah mati. Tetapi protein hanya berfungsi seperti itu jika kebutuhan minimal energi tubuh telah dipenuhi. Istilah kekurangan gizi biasanya merujuk pada kekurangan dua unsur utama itu yaitu kekurangan kalori dan protein (KKP). Unsur lemak berfungsi lebih sebagai cadangan pasokan energi. Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kekurangan gizi biasanya lebih disederhanakan lagi menjadi kekurangan unsur gizi yang utama, kekurangan energi (atau lebih populer kekurangan kalori). Itulah sebabnya dalam mendefinisikan garis kemiskinan hanya dipertimbangkan kebutuhan energi minimal yang dinyatakan dalam rupiah.

Status gizi dalam Laporan ini menggunakan dua indikator: (1) Proporsi anak yang berumur kurang dari lima tahun (balita) berstatus gizi kurang atau buruk diukur dengan berat-umur menurut standar antropometri; dan (2) Proporsi penduduk dengan asupan energi (*energy intake*) kurang dari jumlah minimal tertentu.

#### a. [Status Gizi Balita](#)

Status gizi balita, sekalipun secara teknis hanya mengukur status gizi balita, seringkali juga diinterpretasikan secara luas sebagai indikator gizi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dimaklumi karena balita merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dianggap paling rawan gizi. Penentuan status gizi dilakukan dengan menggunakan standar antropometri sesuai saran Direktorat Gizi (Departemen Kesehatan) yaitu Standard Harvard (NCHS-WHO) yang telah disesuaikan. Standar ini menggunakan status gizi yang ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:

---

<sup>1</sup> Unsur-unsur gizi lainnya yang dikenal sebagai gizi mikro (*micro nutrient*) tidak dicakup dalam Laporan ini karena penghitungannya tampaknya sulit (jika tidak mustahil) dikumpulkan melalui pendekatan survei rumah tangga. Gizi mikro yang dimaksud mencakup berbagai macam vitamin, kalsium, dan semacamnya, unsur gizi yang dianggap sangat penting tetapi diperlukan tubuh tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit.

Kelebihan Berat ( <i>over-weight</i> )	:	$Z_{\text{Score}} > 2SD$
Normal ( <i>normal</i> )	:	$-2SD < Z_{\text{Score}} < 2SD$
Kurang ( <i>moderate</i> )	:	$-3SD < Z_{\text{Score}} < -2SD$
Buruk ( <i>severe</i> )	:	$Z_{\text{Score}} < -3SD$

Catatan:  $Z_{\text{Score}}$  adalah berat badan-umur yang nilainya telah distandarkan, *standardized*

#### b. Asupan Energi

Seperti disinggung sebelumnya, Susenas Modul Konsumsi mengumpulkan data konsumsi makanan secara rinci, mencakup 225 jenis komoditi, masing-masing dapat diperkirakan kandungan energi selain unsur gizi lainnya. Sekalipun data itu dikumpulkan pada level rumahtangga tetapi perkiraan asupan pada level individu dapat dihitung.

Asupan energi dianggap memadai jika jumlahnya memenuhi batas minimal dari acuan tertentu. Batas 2,100 kilo kalori (kcal) per hari per kapita umumnya digunakan sebagai batas kecukupan asupan energi: lebih dari 2,100 dianggap cukup, kurang dari angka itu dianggap kurang. Tetapi untuk mempertajam masalah, dapat digunakan batas lain. Dalam satu seminar internal di BPS awal tahun ini diperoleh kesepakatan batas kekurangan gizi yang lain yaitu 1,700 kkal/hari. Angka itu sebenarnya pembulatan dari 80 persen kali 2,100. Untuk penyederhanaan, dalam Laporan ini angka 2,100 digunakan batas asupan energi yang dianggap kurang sedangkan 1,700 batas acuan sangat kurang.

Praktek perhitungan energi per kapita biasanya dilakukan secara sederhana hanya dengan membagi asupan energi dalam suatu rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Cara ini dilakukan terutama karena alasan penyederhanaan. Walaupun demikian cara ini tidak realistis karena harus mengasumsikan bahwa kebutuhan energi untuk anggota rumahtangga adalah sama, terlepas dari jenis kelamin dan umur anggota rumahtangga itu.

Dalam Laporan ini perhitungan asupan energi per kapita dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi umur dan atau jenis kelamin sehingga hasilnya diharapkan lebih realistis. Disadari sepenuhnya bahwa selain umur dan jenis kelamin banyak faktor lain yang menentukan kebutuhan energi seseorang seperti jenis pekerjaan. Tetapi acuan untuk pengukurannya sejauh ini tidak tersedia secara luas sehingga belum dapat dioperasionalkan.

Laporan ini menggunakan dua acuan yang dijadikan dasar perhitungan asupan energi per kapita dengan mempertimbangkan faktor jenis kelamin dan atau umur. Pertama, acuan OECD yang telah dimodifikasi (*modified-OECD scale*)(Verma, 1999). Acuan ini hanya mempertimbangkan komposisi umur: dewasa pertama, dewasa lainnya, dan anak-anak. Dewasa pertama berlaku untuk kepala rumahtangga, dewasa lainnya untuk anggota dewasa lainnya. Batas dewasa yang ditetapkan adalah umur 14 tahun. Kedua, acuan Amsterdam (Amsterdam-scale) yang luas digunakan (dikutip dari Ritonga, 1994). Skala acuan ini jauh lebih rinci dan mempertimbangkan komposisi umur anggota rumahtangga secara lebih rinci selain jenis kelamin. Hasil evaluasi, seperti akan terlihat nanti pada Bab 4, menunjukkan bahwa acuan Amsterdam agaknya yang paling sesuai untuk kasus Indonesia. Skala OECD menghasilkan angka yang tampaknya terlalu tinggi. Di sisi lain, penghitungan tanpa mempertimbangkan variabel jenis kelamin dan umur sama sekali, cara yang selama ini digunakan BPS, tampak menghasilkan angka yang terlalu rendah (*underestimate*). Tetapi semua pernyataan ini masih perlu dianggap bersifat tentatif, sementara dan terbuka untuk penelitian lebih lanjut.

## **Bab Tiga**

### **Ketersediaan Sumber Gizi**

Status gizi dan ketahanan pangan masyarakat serta prospeknya sebagian tergantung pada sisi ketersediaan pangan untuk keperluan konsumsi makanan dalam negeri. Seperti disinggung pada bab sebelumnya, istilah gizi di sini diartikan sebagai zat makanan yang diperlukan tubuh yang mencakup tiga unsur yaitu energi, protein dan lemak. Walaupun demikian Laporan memfokuskan diri pada unsur gizi yang paling dianggap mendasar yaitu energi.

Sumber energi yang utama adalah makanan pokok (*food staple*) yang dikonsumsi masyarakat. Sumber makanan pokok masyarakat bagi masyarakat Indonesia sebenarnya bermacam-macam tetapi yang utama adalah beras. Oleh karena itu bab ini memfokuskan pembahasannya pada sumber makanan utama itu. Topik yang dibahas secara sepintas lalu pada bab ini adalah produksi beras dalam negeri, peranan impor dalam penyediaan beras dalam negeri, dan peranan beras sebagai sumber gizi masyarakat yang utama.

#### 3.1 Produksi Padi

Bagi Indonesia padi merupakan komoditi tanaman pangan yang sangat strategis karena berkaitan secara langsung dengan kebutuhan paling dasar masyarakat yang masih sangat tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok sehari-hari yang paling utama. Tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masalah ketahanan pangan bagi Indonesia sangat tergantung pada masalah ketersediaan padi dalam negeri serta sebarannya antar wilayah geografis.

Tabel 3.1a menyajikan data produksi padi Indonesia dalam enam tahun terakhir yang tersedia. Pada tabel itu tampak bahwa pada tahun 2004 produksi padi yang mencakup padi sawah maupun padi ladang diperkirakan mencapai sekitar 54 juta ton. Angka itu, dibandingkan dengan angka lima tahun sebelumnya, hanya menunjukkan kenaikan sekitar tiga juta ton, suatu kenaikan yang tidak terlalu mencolok. Pola kenaikan serupa, tidak mencolok, boleh dikatakan berlaku di semua pulau/provinsi yang dibandingkan. Pola seperti itu tampak jelas pada Gambar 3.1a yang menunjukkan bahwa sekalipun secara keseluruhan produksi padi sedikit berfluktuasi antar tahun tetapi secara

keseluruhan perubahannya tidak mencolok. Fluktuasi agak mencolok terjadi pada Sulawesi, pulau ketiga terpenting dalam memberikan sumbangan produksi nasional (lihat Tabel 3.1a).

Gambar 3.1a juga memperlihatkan “ketergantungan” ketersediaan padi nasional terhadap produksi padi pulau Jawa. Pada tahun 2004, misalnya, dari sekitar 54 juta ton produksi nasional, hampir 30 juta ton atau 55 persen merupakan produksi pulau Jawa. Setelah Jawa, pulau lainnya yang memberikan sumbangan penting terhadap produksi padi nasional berturut-turut Sumatera (11-13 juta ton), Sulawesi (4-5 juta ton) Kalimantan (3-3.5 juta ton) dan Bali-Nusa Tenggara (2.0-3.0 juta ton).

Ketergantungan produksi padi nasional terhadap produksi padi pulau Jawa tampak lebih jelas pada Gambar 3.1b. Gambar itu menunjukkan sekitar 55 persen produksi nasional setiap tahunnya disumbangkan oleh pulau Jawa. Angka itu relatif tetap paling tidak selama empat tahun terakhir ini (2001-2004). Produksi padi pulau Jawa, seperti dapat diduga, sebagian besar berasal dari tiga provinsinya yang paling besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masing-masing menyumbang sekitar 17-18 persen dari produksi nasional.

Banyaknya padi/beras yang tersedia untuk konsumsi dalam negeri tergantung terutama pada besarnya produksi dalam negeri. Sumber ketersediaan beras dalam negeri yang lain yaitu ekspor, impor dan stok, secara keseluruhan relatif kecil. Hal ini terlihat antara lain pada Tabel 3.1b. Pada tabel itu tampak bahwa pada tahun 2002, misalnya, Indonesia memproduksi padi sekitar 51.5 juta ton, setelah dikurangi perubahan stok sebesar 1.3 juta ton dan impor sebesar 20 ribu ton maka yang tersedia untuk pemakaian dalam negeri sekitar 50.2 juta ton. Dari jumlah yang tersedia itu sebagian besar diolah menjadi beras yang jumlahnya mencapai 46.6 juta ton, setara dengan 29.4 juta ton beras.

### [3.2 Impor Beras](#)

Impor dalam bentuk padi relatif kecil, tetapi dalam bentuk beras relatif besar. Pada tahun 2002, misalnya, impor beras mencapai 1.8 juta ton atau sekitar 6.1 persen dari total produksi beras. Dengan demikian beras yang tersedia untuk pemakaian dalam negeri sekitar 30.7 juta ton. Pemakaian itu sebagian besar diolah

untuk makanan<sup>2</sup> yang jumlahnya mencapai 29.7 juta ton, lebih tinggi 0.8 persen dari angka produksi. Fakta ini yang menjelaskan perlunya faktor impor untuk keperluan konsumsi dalam negeri.

Impor beras sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan besarnya produksi. Pada tahun 2003 (angka sementara), misalnya, impor beras berjumlah sekitar 1.4 juta ton atau 4.8 persen dari total produksi yang mencapai 29.8 juta ton. Walaupun demikian, tilikan historis selama 20 tahun terakhir mengindikasikan adanya kecenderungan impor yang meningkat. Ini berlaku secara absolut (Gambar 3.1c) maupun relatif terhadap produksi (Gambar 3.1d). Impor beras pada tahun 1998 dan 1999 (puncak krisis) mencapai puncaknya; masing-masing 2.9 dan 4.7 juta ton, atau 10.2 dan 16.1 persen dari total produksi (Tabel 3.1c).

### 3.3 Ketersediaan Unsur Gizi

Arti strategis beras tampak jelas dalam peranannya sebagai sumber utama ketersediaan sumber gizi masyarakat. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2002, misalnya, secara rata-rata nutrisi yang tersedia untuk konsumsi masyarakat per hari per kapita dari semua jenis makanan (nabati maupun hewani) adalah 2,962.0 kkal energi, 74.9 gram protein dan 67.4 gram lemak. Dari angka-angka itu, beras menyumbang masing-masing 1,398.0 kkal energi, 34.3 gram protein dan 5.4 gram lemak; atau masing-masing 47.2, 45.8 dan 8.2 persen ketersediaan energi, protein dan lemak (lihat Tabel 3.2).

Angka-angka itu menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, secara umum sebenarnya tersedia sumber gizi di dalam negeri dalam jumlah yang memadai<sup>3</sup>. Hal ini tentu saja belum menunjukkan ketiadaan masalah gizi di Indonesia karena angka-angka itu masih belum mengungkapkan sebaran antar wilayah dan, lebih penting lagi, belum menunjukkan kandungan gizi makanan yang secara aktual dikonsumsi masyarakat. Kedua, beras berperan sangat penting dalam penyediaan

---

<sup>2</sup> Pengolahan untuk makanan hampir seluruhnya digunakan untuk konsumsi makanan rumah tangga. Untuk keperluan lainnya termasuk industri makanan relatif porsinya sangat kecil. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2002, misalnya, industri makanan hanya menggunakan sekitar 97.5 ribu ton beras dan 16.6 ribu ton tepung beras. Angka-angka itu sangat kecil yang secara keseluruhan kurang dari 0.5% dari total beras yang tersedia untuk pengolahan makanan yaitu 29.7 juta ton.

<sup>3</sup> Angka 2,100 kkal per hari per kapita biasanya dijadikan acuan kecukupan energi.



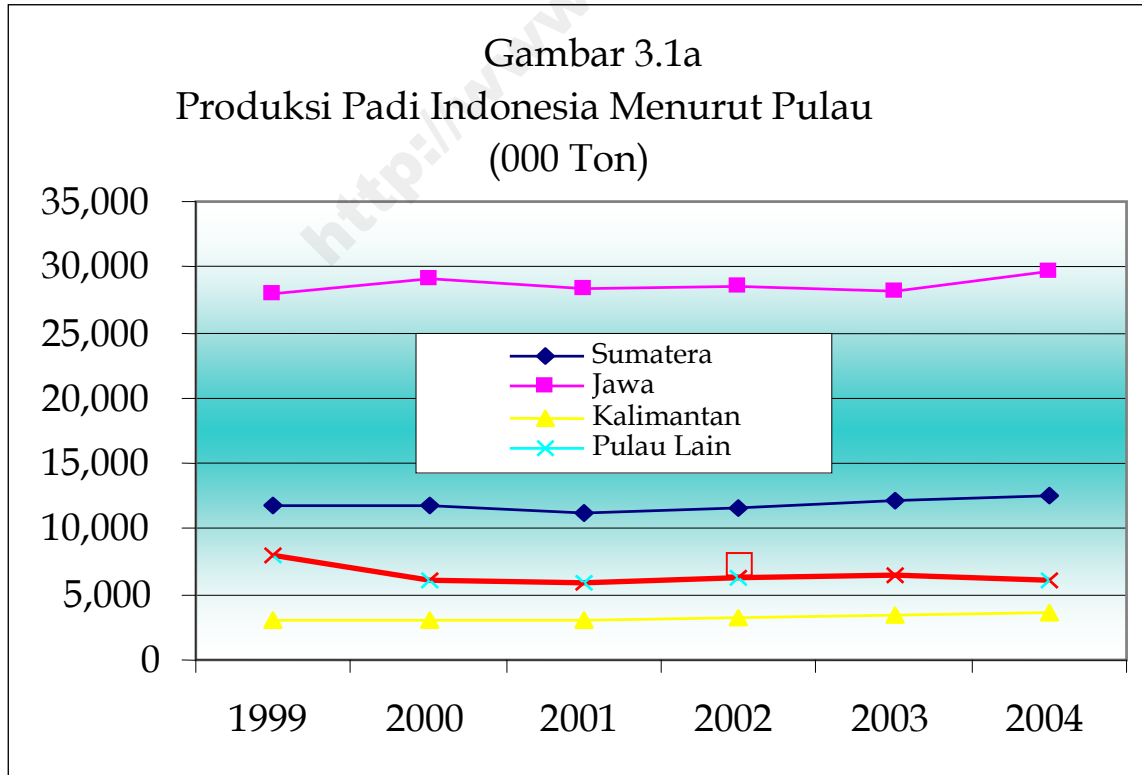
sumber gizi khususnya energi dan protein. Relatif besarnya sumbangan beras untuk penyediaan energi menunjukkan rendahnya diversifikasi tanaman pangan pokok di Indonesia. Keadaan ini perlu menjadi catatan penting dalam upaya pembangunan ketahanan pangan jangka panjang. Sebagai catatan tambahan, relatif besarnya sumbangan beras untuk penyediaan protein mengindikasikan ketergantungan “yang berlebihan” terhadap sumber protein nabati (yang pada umumnya berkualitas jauh lebih rendah dari pada protein hewani), sekaligus mengisyaratkan masih sangat rendahnya tingkat ketersediaan sumber-sumber protein hewani.

Relatif rendahnya sumbangan beras untuk penyediaan lemak dapat difahami karena beras memang tidak mengandung banyak unsur lemak. Yang mungkin mengherankan bagi sebagian pihak adalah bahwa ketersediaan protein maupun lemak sebagian besar justru berasal dari sumber nabati, bukan dari sumber hewani sebagaimana diperlihatkan secara gamblang oleh Gambar 3.1e dan 3.1f.

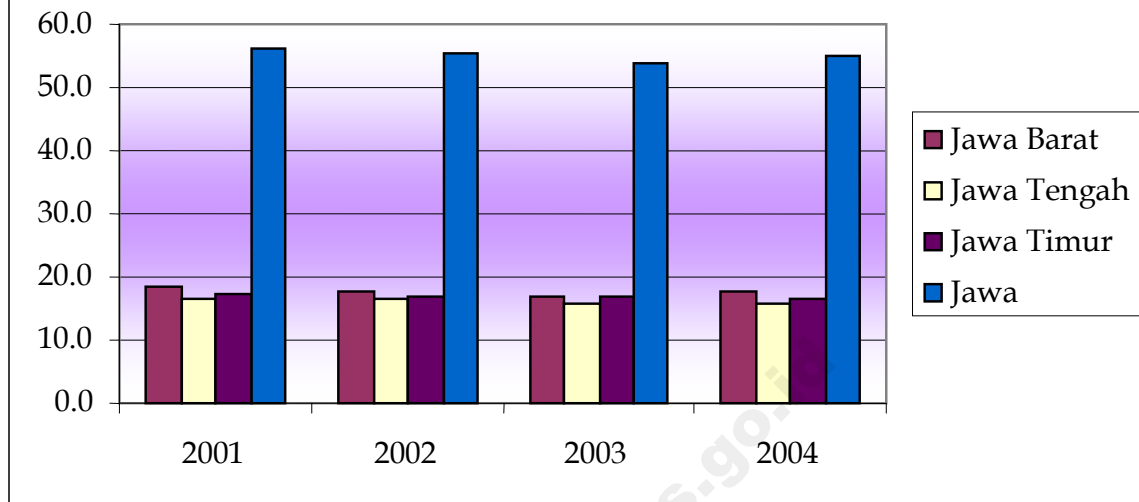
Tabel 3.1a  
Produksi Padi menurut Pulau/Provinsi (000 Ton)

Pulau/Provinsi	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sumatera	11,816	11,819	11,287	11,542	12,136	12,666
Jawa	27,923	29,120	28,312	28,608	28,167	29,636
DKI Jakarta	16	16	17	11	8	13
Jawa Barat	9,993	10,750	9,238	9,167	8,777	9,602
Jawa Tengah	8,346	8,475	8,290	8,504	8,124	8,513
Yogyakarta	612	654	662	654	652	693
Jawa Timur	8,956	9,224	8,673	8,804	8,915	9,002
Banten	-	-	1,433	1,469	1,692	1,812
Bali dan Nusa Tenggara	2,705	2,776	2,696	2,647	2,725	2,807
Kalimantan	3,067	3,000	3,074	3,169	3,358	3,657
Sulawesi	5,225	5,065	4,983	5,438	5,602	5,171
Maluku dan Papua	131	118	109	85	149	151
<b>INDONESIA</b>	<b>50,866</b>	<b>51,899</b>	<b>50,461</b>	<b>51,490</b>	<b>52,138</b>	<b>54,088</b>

Sumber: BPS (2005), Statistik Indonesia 2004



**Gambar 3.1b: Proporsi Produksi Padi Pulau Jawa terhadap Produksi Padi Nasional (%)**



**Tabel 3.1b:**  
Produksi Padi dan Beras serta Komponen Pemakaiannya, 2002

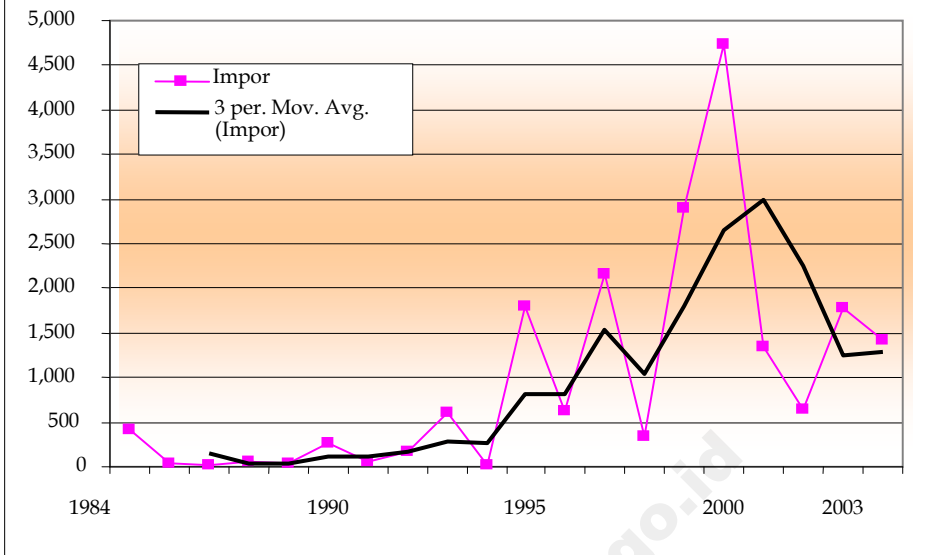
	Padi (gabah)		Beras	
	(000 ton)	(%)	(000 ton)	(%)
Produksi	51,490	100.0	29,431	100.0
Impor	20	0.0	1,786	6.1
Ekspor	0	0.0	4	0.0
Pemakaian dalam negeri:	50,242	97.6	30,687	104.3
Pakan	221	0.4	52	0.2
Bibit	459	0.9	0	0.0
Diolah untuk makanan	46,568	90.4	0	0.0
Diolah untuk bukan makanan	281	0.5	203	0.7
Tercecer	2713	5.3	767	2.6
Bahan makanan	0	0.0	29,665	100.8

Sumber: Diolah dari Neraca Bahan Makanan 2002

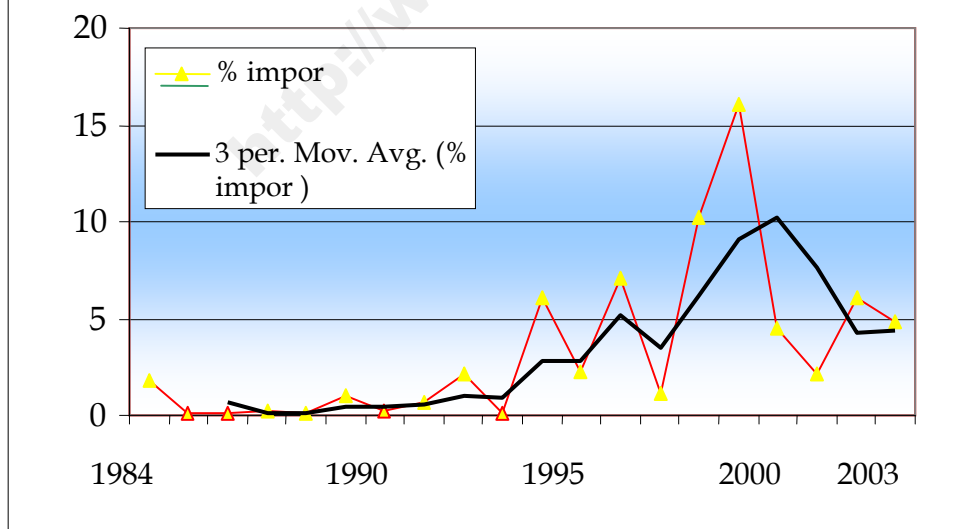
Tabel 3.1c.  
Tren Produksi dan Impor Beras 1984-2003  
(Dalam Ribuan Ton)

Tahun	Produksi	Impor	% Impor
1984	23,736	414	1.7
1985	24,316	34	0.1
1986	24,744	28	0.1
1987	24,970	55	0.2
1988	25,949	33	0.1
1989	26,654	268	1.0
1990	26,925	48	0.2
1991	26,615	171	0.6
1992	28,738	606	2.1
1993	28,750	24	0.1
1994	27,789	625	2.2
1995	29,626	1,807	6.1
1996	30,458	2,150	7.1
1997	29,466	345	1.2
1998	28,419	2,895	10.2
1999	29,428	4,742	16.1
2000	30,045	1,354	4.5
2001	29,229	637	2.2
2002	29,431	1,786	6.1
2003	29,794	1,425	4.8

**Gambar 3.1c: Tren Impor Beras Indonesia (000 Ton)**



**Gambar 3.1d: Tren Impor terhadap Produksi Beras (%)**

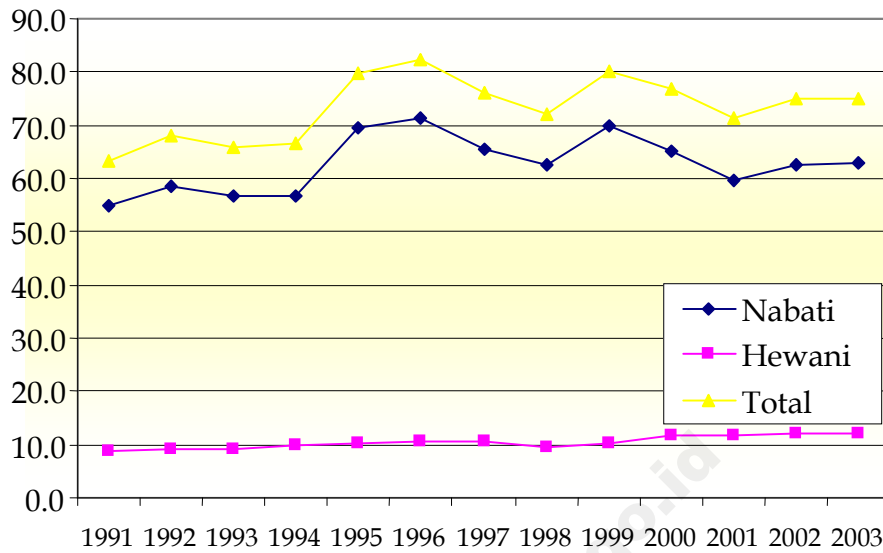


Tabel 3.2  
Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Per Kapita/Hari dari  
Beras dan dari Semua Bahan Makanan

	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Beras:</b>					
Energi (kkal)	1,676.0	1,488.0	1,386.0	1,398.0	1,402.0
Protein (gram)	41.1	36.5	34.0	34.3	34.4
Lemak (gram)	6.5	5.7	5.3	5.4	5.4
<b>Semua Bahan Makanan:</b>					
Energi (kkal)	3,215.0	3,103.0	2,991.0	2,962.0	3,061.0
Protein (gram)	85.2	81.7	70.8	74.9	74.9
Lemak (gram)	62.0	64.4	73.1	67.4	74.3
<b>Sumbangan Beras (%):</b>					
Energi	52.1	48.0	46.3	47.2	45.8
Protein	48.2	44.7	48.0	45.8	45.9
Lemak	10.4	8.9	7.3	8.0	7.3

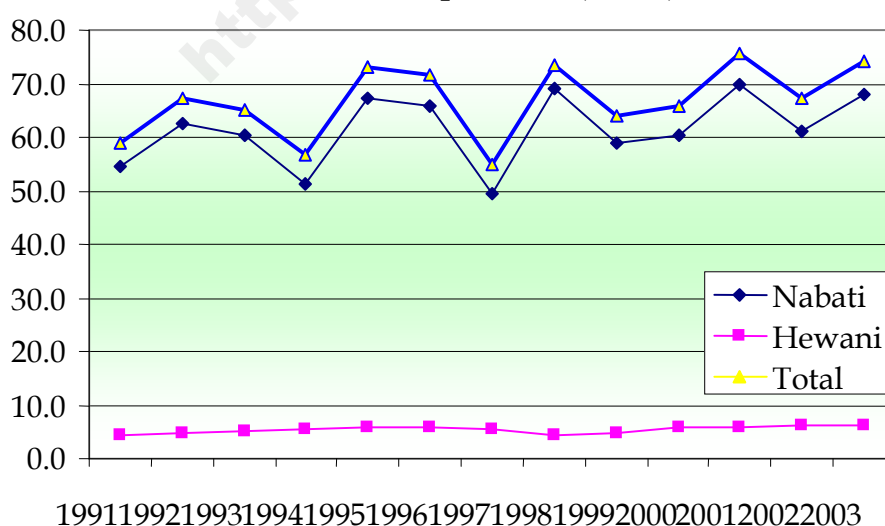
Sumber: BPS-Departemen Pertanian, Neraca Bahan Makanan  
(berbagai tahun)

**Gambar 3.1e: Ketersediaan Protein Nabati dan Hewani Per Kapita/Hari (Gram)**



Sumber: Neraca Bahan Makanan 2002-3

**Gambar 3.1f: Ketersediaan Lemak Nabati dan Hewani Per Kapita/Hari (Gram)**



Sumber: Neraca Bahan Makanan 2002-3

## **Bab Empat** **Status Gizi Balita**

Bab ini menyajikan gambaran status gizi penduduk berumur dibawah lima tahun (balita) - sebagian dari kelompok masyarakat yang tergolong rawan gizi. Seperti dijelaskan pada Bab Dua, penetapan status gizi balita ditentukan berdasarkan pendekatan antropometris dan penghitungannya menggunakan data berat badan-umur balita yang diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan. Pembahasan bab ini mencakup antara lain tren status gizi balita antar tahun, perbedaan antar tipe daerah, perbandingan antar wilayah, dan kaitan antara status gizi dan angka kematian bayi (AKB) dan kemiskinan.

### 4.1 Tren Status Gizi

Status gizi balita Indonesia secara keseluruhan masih relatif rendah dan cenderung tidak membaik. Pada tahun 2003 (data terkini yang tersedia), misalnya, balita yang berstatus gizi kurang atau bahkan buruk<sup>4</sup> relatif tinggi, sekitar 28.6 persen yang terdiri dari 8.9 bergizi buruk dan 19.7 persen bergizi kurang. Dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya angka-angka itu menunjukkan adanya kenaikan, suatu indikasi memburuknya status gizi balita dalam kurun waktu 2002-2003. Dalam kurun waktu sebelumnya, 2001-2002, proporsi balita berstatus gizi kurang menurun tetapi yang bergizi buruk meningkat. Secara singkat dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 2001-2003 tidak ada indikasi adanya perbaikan status gizi balita di Indonesia. Tabel 4.1 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tren status gizi balita Indonesia selama kurun waktu 2001-2003 yang mendukung kesimpulan itu. Gambar 4.1 menyajikan gambaran visual kecenderungan itu. Pada gambar itu terlihat bahwa dalam kurun 2002-2003 terjadi sedikit kenaikan proporsi balita berstatus gizi buruk dan kurang, dan sebaliknya, penurunan proporsi yang berstatus gizi cukup.

Perbandingan antar tipe daerah menunjukkan bahwa status gizi balita lebih buruk di daerah pedesaan. Hal ini terlihat dari proporsi balita bergizi buruk atau kurang justru lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah kota.

---

<sup>4</sup> Berstatus gizi kurang atau buruk berarti memiliki skor berat badan-umur standar kurang dari minus dua.



Keadaan ini terjadi paling tidak selama kurun waktu 2001-2003 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.2.

#### 4.2 Perbandingan Antar Wilayah

Status gizi balita dan trennya bervariasi antar provinsi. Status gizi balita relatif sangat buruk di provinsi-provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Proporsi balita berstatus gizi kurang atau buruk di ketiga provinsi itu pada tahun 2003 masing-masing mendekati 40 persen atau bahkan lebih. Selain itu, sebagaimana halnya terjadi di kebanyakan provinsi lainnya, angka persentase di ketiga provinsi itu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2002-2003. Status gizi balita juga relatif buruk, diukur dengan persentase balita berstatus gizi kurang atau buruk di atas 30 persen pada tahun 2003, di enam provinsi lainnya: Nusa Tenggara Barat (34.6 persen), Sulawesi Tengah (32.0), Sulawesi Selatan (31.5), Sumatera Utara (31.8), Sumatera Selatan (31.3) dan Bangka Belitung (30.6).

Pada tahun 2003 hanya terdapat dua provinsi yang memiliki balita dengan status gizi relatif sangat baik (diukur dengan persentase balita berstatus gizi kurang atau buruk kurang dari 20 persen). Kedua provinsi itu adalah Bali dan Yogyakarta.

Tabel 4.2 menyajikan daftar provinsi menurut prevalensi balita berstatus gizi kurang atau buruk selama kurun 2001-2003. Tabel itu menegaskan kesimpulan sebelumnya: status gizi bervariasi antar provinsi dan trennya di kebanyakan provinsi memburuk selama kurun 2002-2003.

Gambar 4.3 menyajikan gambaran visual perbandingan antar provinsi pada tahun 2003. Gambar itu menunjukkan bahwa proporsi balita berstatus gizi buruk tidak sepenuhnya sejalan dengan proporsi balita berstatus gizi kurang. Artinya, provinsi yang memiliki angka proporsi balita berstatus gizi buruk yang rendah belum tentu memiliki angka proporsi yang berstatus gizi kurang yang rendah pula. Contoh ekstrim terlihat untuk Jambi. Provinsi itu memiliki angka proporsi yang berstatus gizi buruk relatif sangat rendah (bahkan paling rendah di Indonesia, sekitar tiga persen) tetapi proporsi yang berstatus gizi kurang relatif sangat tinggi, hampir 20 persen.

Hasil studi BPS-WFP (akan terbit) menunjukkan bahwa variasi status gizi balita antar wilayah juga ditemukan untuk tingkat kabupaten/kota atau kecamatan dengan tingkat variasi yang lebih besar. Gambaran visual mengenai besarnya variasi antar kabupaten/kota ditunjukkan oleh Peta 1 yang dikutip dari hasil studi itu. Peta itu antara lain memperlihatkan 13 kabupaten/kota dimana prevalensi balita berstatus gizi kurang relatif sangat tinggi (ditunjukkan oleh warna paling gelap), dimana persentase balita berstatus gizi kurang di atas 40 persen. Ke 13 kabupaten/kota itu adalah Landak-Kalbar (54.4 persen), Hulu Sungai Utara-Kalsel (48.1 persen), Timor Tengah Utara-NTT (47.8 persen), Nias-Sumut (47.2 persen), Timor Tengah Selatan-NTT (46.8 persen), Sintang-Kalbar (46.1 persen), Kota Tanjung Balai-Sumut (43.6 persen), Lembata-NTT (43.2 persen), Ketapang-Kalbar (42.8 persen), Belu-NTT (42.0 persen), Kupang-NTT (41.2 persen), Alor-NTT (41.1 persen) dan Kota Sibolga-Sumut (41.1 persen).

#### 4.3 Status Gizi, AKB dan Kemiskinan

Banyak faktor yang diduga berkaitan dengan status gizi balita dan salah satu di antaranya adalah angka kematian bayi (AKB). Wilayah yang memiliki prevalensi balita bergizi kurang/buruk yang tinggi diduga cenderung memiliki AKB yang tinggi pula. Dugaan yang tampaknya memang logis ini ternyata memperoleh dukungan empiris sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.4. Gambar itu memperlihatkan adanya hubungan positif antara AKB dan persentase balita berstatus gizi buruk untuk kasus kecamatan di Jawa Tengah. Dalam kasus ini status gizi buruk menjelaskan sekitar 25 persen dari variasi AKB kecamatan di Jawa Tengah. Pada sisi lain, AKB ternyata berkaitan dengan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Jawa Timur (lihat Gambar 4.5). Dari dua gambar itu dapat disimpulkan bahwa status gizi berkaitan positif dengan angka kemiskinan: wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi cenderung memiliki angka persentase status gizi buruk yang tinggi pula, *tetapi tidak selalu*.

Imbuhan "*tetapi tidak selalu*" dalam kalimat terakhir menunjukkan bahwa hubungan itu bersifat *probabilistic*. Ini berarti, mungkin saja terjadi kasus dimana wilayah yang memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi memiliki AKB yang rendah; dan sebaliknya, mungkin juga terjadi kasus dimana wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi memiliki AKB yang rendah. Kasus kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dijadikan contoh ilustratif mengenai dua

jenis “anomali” ini (lihat Tabel 4.3). Untuk kasus pertama (angka kemiskinan rendah tetapi AKB tinggi) terjadi di kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Banyuwangi. Kasus seperti ini mungkin menunjukkan kurang efektifnya program-program terkait dengan upaya-upaya peningkatan status kesejahteraan balita. Di sisi lain, untuk kasus kedua (angka kemiskinan tinggi tetapi AKB rendah) ditemukan di kabupaten/kota Ngawi, Ponorogo, Trenggalek dan Pacitan. Kasus ini terjadi mungkin mencerminkan efektifnya program-program perbaikan status kesejahteraan balita.

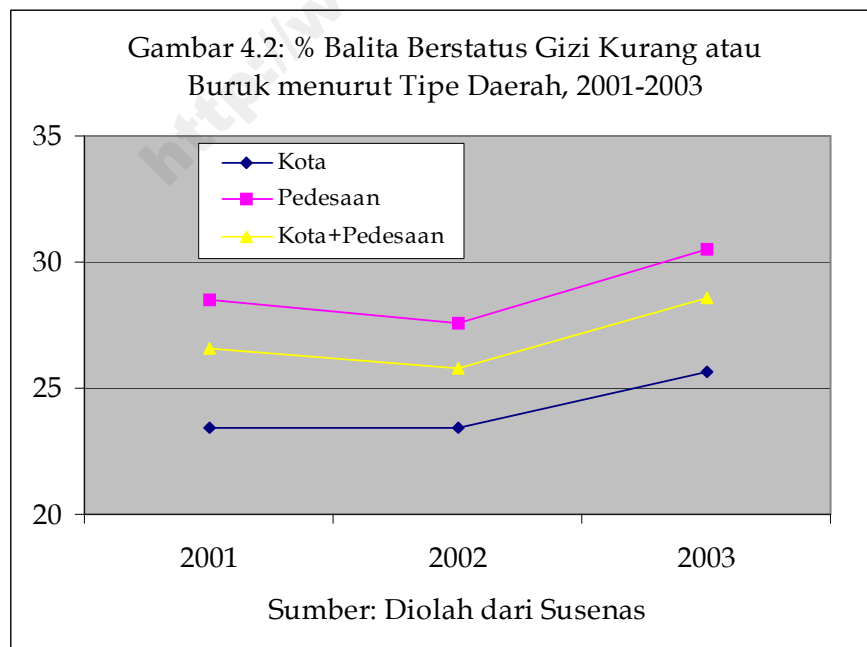
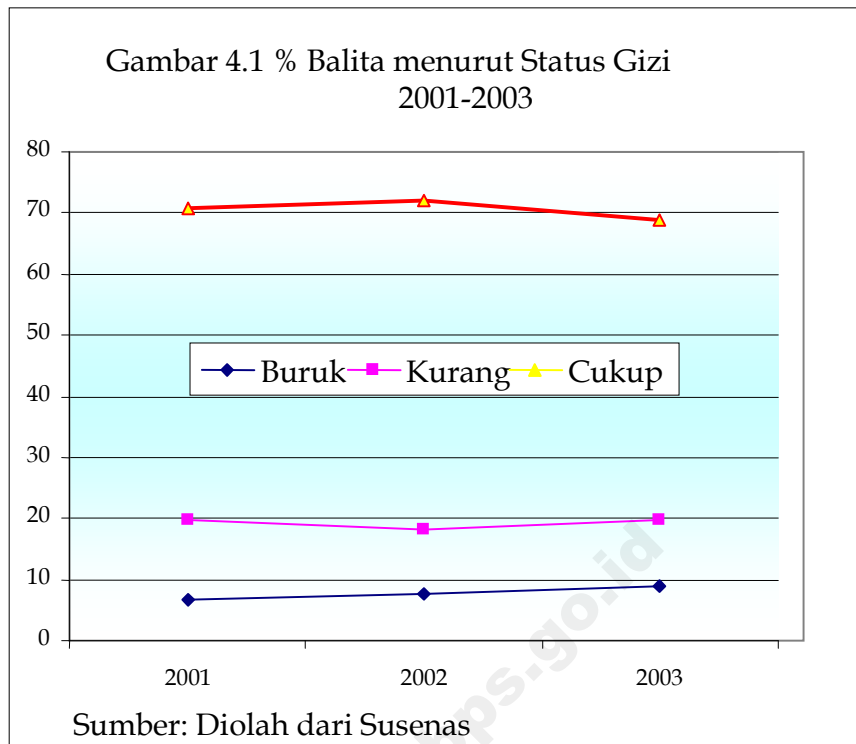
Tabel 4.1  
Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi dan  
Tipe Daerah, 2001-2003

Status Gizi	2001	2002	2003
	<u>Kota</u>		
Buruk	5.5	6.6	7.5
Kurang	18.0	16.8	18.2
Cukup	73.5	73.7	71.5
Lebih	3.1	2.9	2.8
Total	100.0	100.0	100.0
	<u>Pedesaan</u>		
Buruk	7.6	8.1	9.8
Kurang	20.9	19.5	20.7
Cukup	68.9	70.5	67.2
Lebih	2.7	1.9	2.3
Total	100.0	100.0	100.0
	<u>Kota+Pedesaan</u>		
Buruk	6.8	7.5	8.9
Kurang	19.8	18.3	19.7
Cukup	70.6	71.9	68.9
Lebih	2.8	2.3	2.5
Total	100.0	100.0	100.0

Sumber: Diolah dari Susenas

Catatan: Buruk:  $Zscore < -3$ ; Kurang:  $-3 < Zscore < -2$ ;

Cukup:  $-2 < Zscore < 2$ ; Lebih:  $Zscore > 2$



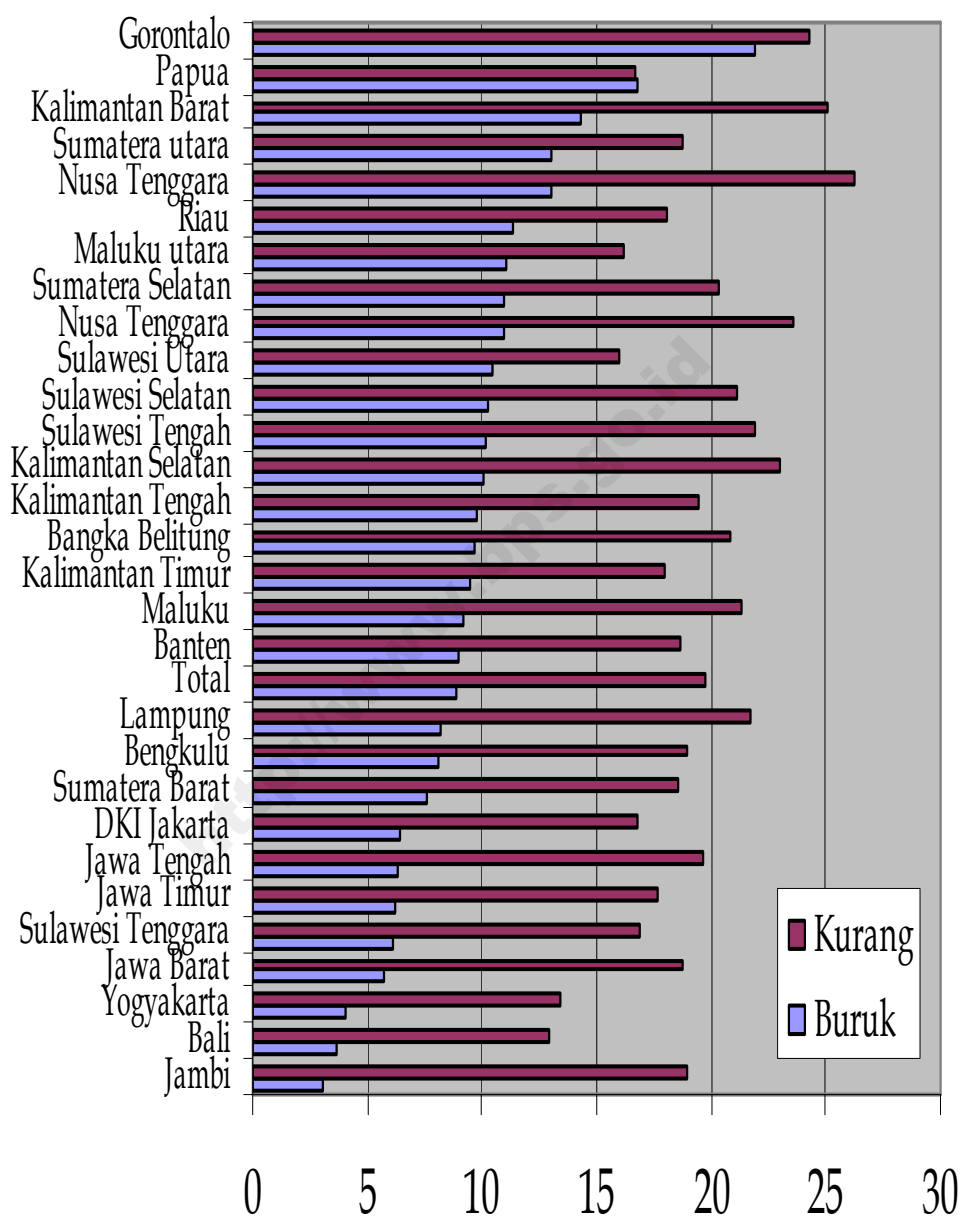
Tabel 4.2  
 Persentase Balita Berstatus Gizi Kurang atau Buruk (\*)  
 2001-2003

	2001	2002	2003
Sumatera utara	27.3	33.1	31.8
Sumatera Barat	22.2	28.1	26.2
Riau	28.9	18.4	29.4
Jambi	24.5	25.0	22.1
Sumatera Selatan	28.6	28.2	31.3
Bengkulu	18.1	26.4	27.0
Lampung	24.7	23.7	29.9
Bangka Belitung	25.5	21.1	30.6
DKI Jakarta	19.2	23.2	23.3
Jawa Barat	20.4	21.5	24.5
Jawa Tengah	23.8	25.1	26.0
Yogyakarta	20.7	16.9	17.4
Jawa Timur	25.5	25.5	23.8
Banten	27.5	20.5	27.6
Bali	15.8	18.7	16.6
Nusa Tenggara Barat	31.8	37.8	34.6
Nusa Tenggara Timur	35.5	38.8	39.3
Kalimantan Barat	34.4	33.2	39.3
Kalimantan Tengah	37.2	31.9	29.3
Kalimantan Selatan	30.1	30.2	33.0
Kalimantan Timur	23.5	21.6	27.4
Sulawesi Utara	41.9	21.9	26.5
Sulawesi Tengah	31.6	29.6	32.0
Sulawesi Selatan	35.5	29.1	31.5
Sulawesi Tenggara	28.1	28.3	23.0
Gorontalo	33.8	42.0	46.2
Maluku	...	...	30.5
Maluku utara	...	...	27.2
Papua	...	...	33.4
Indonesia	26.6	25.8	28.6

Sumber: Diolah dari Susenas

Catatan: ... Data tidak tersedia; (\*) Zscore < -2

Gambar 4.3 % Balita Berstatus Gizi Buruk atau Kurang  
2003



Sumber: Diolah dari Susenas

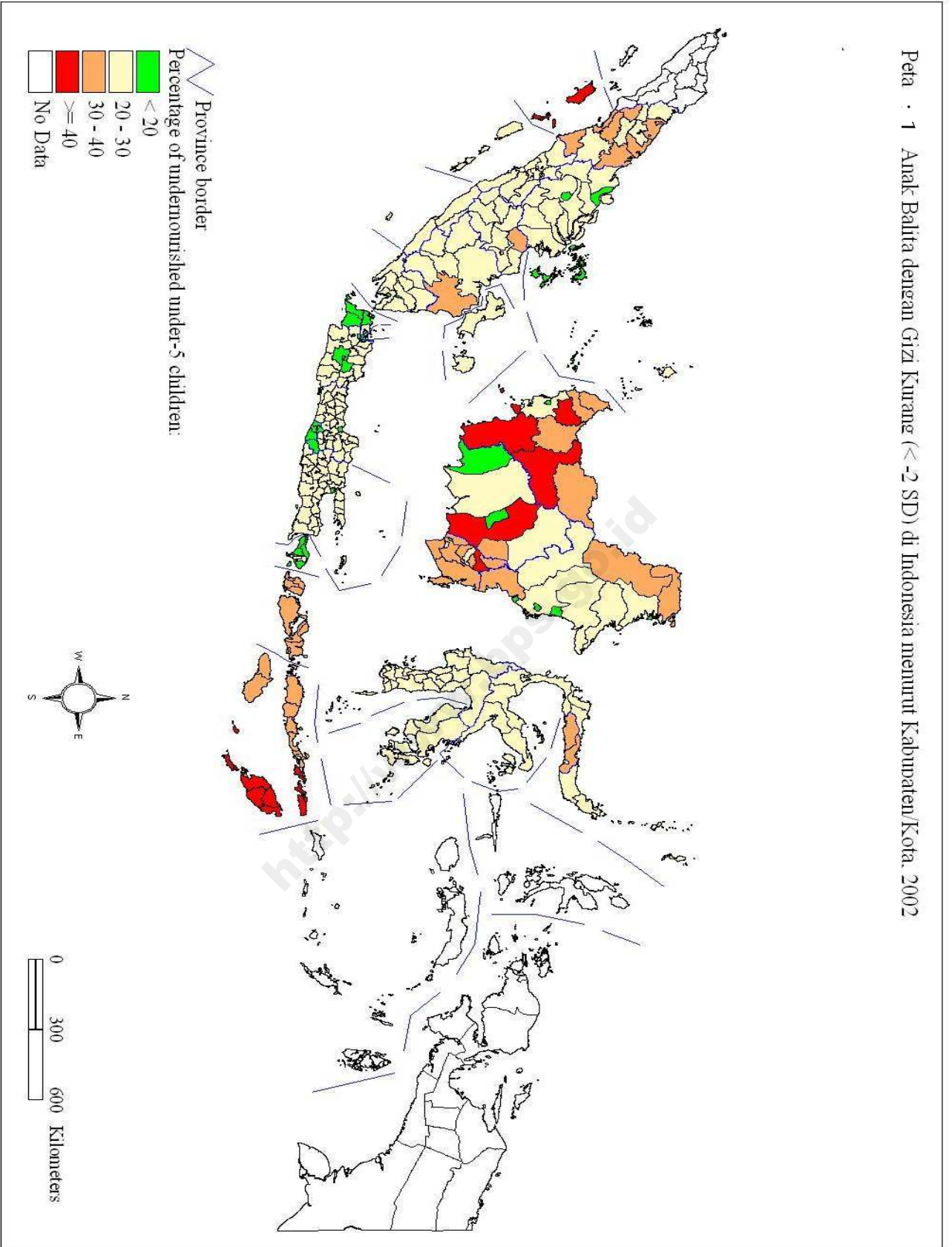
Tabel 4.3  
 Tipologi Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut  
 Angka Kemiskinan dan Angka Kematian Bayi

		Angka Kematian Bayi	
		Tinggi	Rendah
A n g k a  K e m i s k i n d a n	T i n g g i	Kab. Pasuruan (28.7, 68.6), Lumajang (30.1, 54.7), Jember (32.0, 73.6), Sumenep (34.0, 68.6), Situbondo (34.6, 67.6), Lamongan (36.2, 45.7), Bondowoso (37.6, 79.6), Pamekasan (38.7, 73.6), Probolinggo (39.0, 78.6), Bojonegoro (40.7, 49.7), Tuban (42.5, 49.7), Bangkalan (44.2, 69.6), Sampang (51.4, 89.5)	Ngawi (31.7, 41.7), Ponorogo (34.3, 39.7), Trenggalek (37.9, 32.7), Pacitan (39.6, 37.7)
	R e n d a h	Malang (16.3, 47.7), Kota Pasuruan (24.6, 57.6), Banyuwangi (28.4, 55.6)	Surabaya (8.5, 42.7), Sidoarjo (15.9, 39.7), Kota Madiun (16.2, 33.7), Kota Mojokerto (18.6, 29.8), Kota Kediri (19.2, 37.7), Gresik (23.1, 41.7), Magetan (24.6, 37.7), Kab. Mojokerto (24.9, 42.7), Kab. Madiun (25.0, 43.7), Probolinggo (25.1, 43.7), Kab. Kediri (25.5, 39.7), Kab. Blitar (27.4, 36.7), Kota Blitar (27.5, 31.7), Tulungagung (28.1, 28.8), Nganjuk (28.6, 43.7), Jombang (28.6, 43.7)

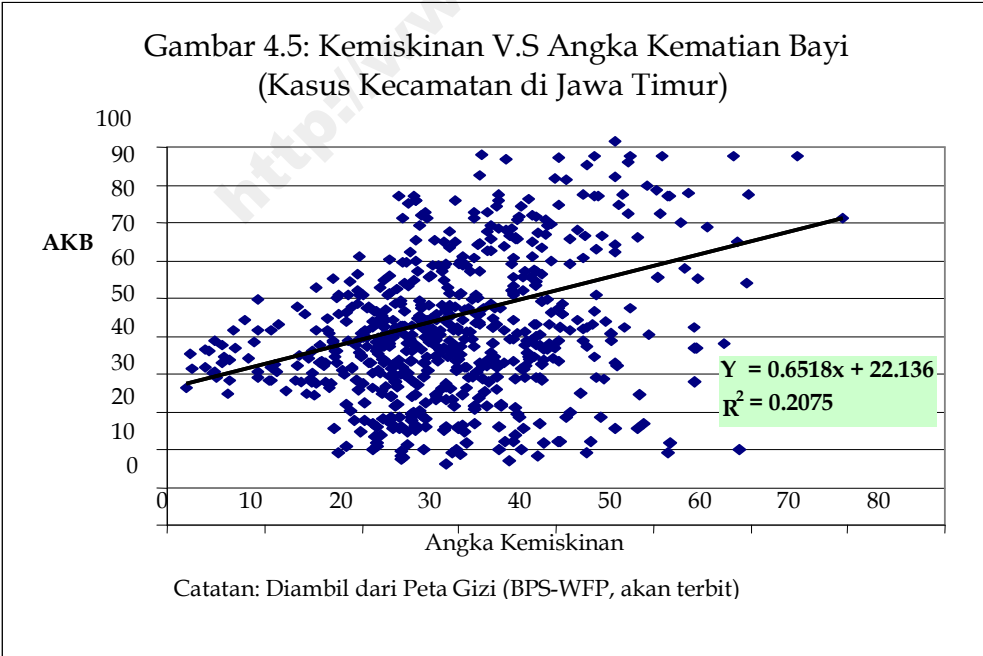
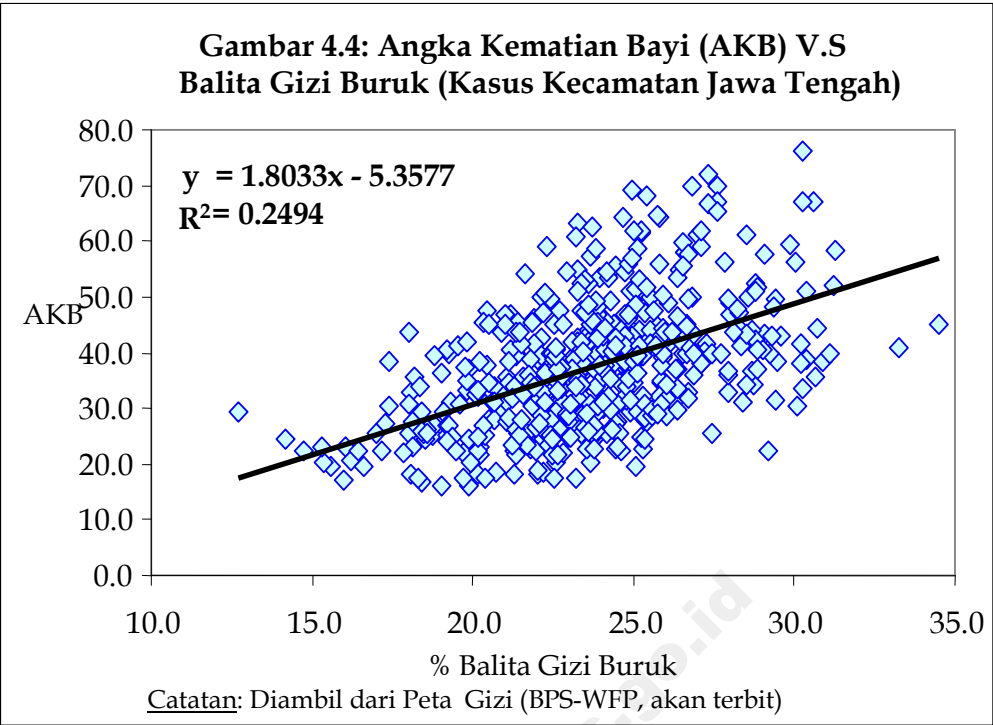
Catatan: (1) Angka dalam kurung masing-masing menunjukkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi. Angka median digunakan sebagai pembatas tinggi-rendah angka.

(2) Diambil dari Peta Gizi (BPS-WFP, akan terbit)

Peta . 1 Anak Balita dengan Gizi Kurang (< -2 SD) di Indonesia menurut Kabupaten/Kota. 2002







<http://www.bps.go.id>

## **Bab Lima** **Asupan Energi**

Istilah asupan energi (*energy intake*) dalam Laporan ini merujuk pada tingkat konsumsi makanan dilihat dari kandungan energinya. Besarnya kandungan energi dari konsumsi tentu saja berbeda dengan yang berasal dari bahan makanan yang tersedia untuk konsumsi sebagaimana tercermin dalam Neraca Bahan Makanan (NBM). Seperti dikemukakan pada Bab Tiga, secara keseluruhan sebenarnya tersedia sumber zat gizi khususnya energi dalam jumlah yang lebih dari cukup. Pada tahun 2003, misalnya, tersedia sumber energi sekitar 3,000 kkal per kapita, jauh di atas angka yang secara umum digunakan sebagai batas kecukupan energi yaitu 2,100 kkal. Sebagai catatan, sumber energi yang tersedia itu sangat tergantung pada komoditi beras yang menyumbang sekitar 46 persen dari total yang tersedia. Sudah barang tentu tidak semua sumber makanan yang tersedia itu dikonsumsi masyarakat sehingga angka ketersediaan belum dapat menggambarkan status gizi mereka. Status gizi masyarakat (dilihat dari kecukupan asupan zat gizi) lebih realistis jika dilihat dari asupan zat gizi yang terkandung dalam jumlah dan komposisi makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Bab ini membahas secara singkat berbagai aspek status gizi masyarakat dilihat dari asupan energi sebagai salah satu zat gizi yang utama. Beberapa pertanyaan kunci yang ingin dijawab: (1) Berapa tingkat konsumsi masyarakat diukur dengan asupan energi, (2) Bagaimana variasinya antar wilayah, (3) Bagaimana pula prevalensi penduduk kurang gizi (*undernourished*) serta variasinya antar wilayah.

### 5.1 Gambaran Umum

Data Susenas 2002 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mengkonsumsi makanan dengan kandungan energi sekitar 2,000 kkal per kapita per hari. Angka itu lebih rendah dari batas kecukupan asupan energi normal (2,100 kkal). Tetapi perbandingan itu perlu dibaca secara kritis dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia secara rata-rata kekurangan gizi. Alasannya adalah

bahwa angka 2,000 kkal itu diperoleh dari perhitungan langsung data Susenas, tanpa mempertimbangkan komposisi umur-jenis kelamin penduduk<sup>1</sup>.

Jika komposisi umur dipertimbangkan maka data Susenas akan menghasilkan angka yang jauh berbeda. Sebagai gambaran, dengan memakai acuan OECD<sup>2</sup> data Susenas 2002 menghasilkan angka asupan energi sekitar 3,600 kkal per kapita per hari. Angka ini jelas tidak realistis jika dipertimbangkan bahwa sumber energi yang tersedia hanya 3,000 kkal. Dengan perkataan lain acuan OECD ini tampaknya tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Jika komposisi jenis kelamin juga dipertimbangkan dalam penghitungan (selain umur) data Susenas juga menghasilkan angka yang berbeda dengan angka yang diperoleh tanpa memperhitungkan umur-jenis kelamin sama-sekali. Data Susenas 2002, misalnya, dengan menggunakan acuan skala Amsterdam menghasilkan angka asupan energi sekitar 2,400 kkal, tepatnya 2,373 kkal per kapita per hari. Angka ini tampaknya paling realistis. Angkanya, jauh di bawah angka ketersediaan (sekitar 3,000 kkal) tetapi lebih tinggi dari angka yang diperoleh dengan mengabaikan variabel umur dan jenis kelamin (sekitar 2,000). Angka itu dengan acuan skala ini lebih tinggi sekitar 200 kkal dari angka acuan umum (2,100 kkal). Dengan demikian, menggunakan acuan ini, masyarakat Indonesia secara rata-rata sebenarnya telah memenuhi kecukupan energi (lihat Tabel 5.1).

## 5.2 Perbandingan Antar Provinsi

Asupan energi bervariasi antar provinsi. Pada tahun 2002, misalnya, rentang asupan energi terletak antara 2,143 kkal untuk Yogyakarta dan 2,604 kkal untuk Sulawesi Tenggara. Relatif rendahnya asupan energi untuk Yogyakarta mungkin terkait dengan relatif tingginya proporsi penduduk provinsi itu yang berstatus mahasiswa. Kelompok masyarakat ini sebagian besar mengkonsumsi makanan jadi (tidak memasak sendiri) yang diduga tidak sepenuhnya tercakup dalam data

---

<sup>1</sup> Umur dan jenis kelamin jelas mempengaruhi tingkat kebutuhan energi seseorang. Selain dua variabel itu tentu saja banyak variabel lain yang berpengaruh seperti jenis pekerjaan. Variabel itu idealnya dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kebutuhan gizi tetapi karena sejauh ini belum ada acuannya maka hal itu secara operasional belum dapat diperhitungkan.

<sup>2</sup> Acuan ini mengkategorikan anggota rumahtangga ke dalam tiga kelompok besar: dewasa pertama dengan skor 1.0, dewasa lainnya dengan 0.5 dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dengan skor 0.3. Dengan demikian acuan ini mengabaikan perbedaan kebutuhan gizi antar jenis kelamin.

Susenas. Dugaan ini sejalan dengan relatif rendahnya asupan energi untuk Provinsi DKI Jakarta yang hanya 2,143 kkal, kedua terendah di Indonesia. Bagi penduduk Jakarta konsumsi makanan jadi sudah sangat biasa. Walaupun demikian, asupan energi di kedua provinsi “khusus” dengan asupan energi rendah ini masih di atas 2,100 kkal yang mengindikasikan bahwa secara rata-rata kecukupan energi sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan pula bahwa kecukupan asupan energi berlaku di seluruh Indonesia.

Relatif tingginya asupan energi untuk Sulawesi Tenggara tidak mustahil pula terkait dengan kurangnya kebiasaan penduduk mengkonsumsi makanan jadi. Tetapi untuk meyakinkan hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut yang berada di luar cakupan Laporan ini.

Perbandingan menurut antar tipe daerah menunjukkan, ini mungkin di luar dugaan bagi sebagian pengamat, bahwa asupan energi lebih tinggi bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan (rata-rata 2,373 kkal) dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan (2,281 kkal). Hal ini berlaku di seluruh Indonesia kecuali Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Di empat provinsi itu asupan energi lebih tinggi di daerah perkotaan (lihat Tabel 5.2 dan Gambar 5.1).

### 5.3 Prevalensi Penduduk Kurang Gizi

Fakta bahwa secara rata-rata penduduk Indonesia telah memenuhi kecukupan energi sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berarti bahwa tidak ada penduduk Indonesia yang kekurangan gizi (*undernourished*). Data Susenas 2002 menunjukkan bahwa secara nasional ada 37.4 persen penduduk dengan asupan energi per hari kurang dari 2,100 kkal (kurang) dan 14.1 persen kurang dari 1,700 kkal (sangat kurang).

Prevalensi penduduk dengan asupan energi kurang maupun sangat kurang bervariasi antar provinsi. Pada tahun 2002, rentang proporsi penduduk dengan asupan energi kurang terletak antara 21.1 persen untuk Bali dan 49.2 persen untuk Yogyakarta. Pada tahun yang sama, rentang proporsi yang sangat kurang terletak antara 5.9 dan 20.6 persen masing-masing juga untuk Bali dan Yogyakarta (lihat Tabel 5.3). Prevalensi itu juga bervariasi antar kabupaten/kota sebagaimana

ditunjukkan oleh Peta 2. Data dasar pemetaan diambil dari Peta Gizi yang rencananya akan diterbitkan oleh BPS-WFP dalam waktu dekat<sup>3</sup>.

Antara kedua ukuran kurang gizi tersebut tampak ada korelasi positif: semakin tinggi prevalensi gizi kurang, semakin tinggi prevalensi gizi sangat kurang. Hal ini tampak pada Gambar 5.4. Tetapi gambar itu juga memperlihatkan ada beberapa kasus “anomali”. Sebagai ilustrasi, proporsi penduduk Gorontalo dengan gizi kurang (34.2 persen) lebih tinggi dari pada proporsi yang sama untuk Sulawesi Tenggara (26.9 persen); tetapi, proporsi penduduk dengan gizi sangat kurang lebih tinggi di Sulawesi Tenggara (10.1) dari pada di Gorontalo (10.0 persen). Kasus ini menunjukkan bahwa korelasi di antara kedua indikator itu tidak sempurna<sup>4</sup>.

#### 5.4 Faktor Sosial-Ekonomi

Sejumlah faktor sosial-ekonomi berpengaruh terhadap status gizi penduduk dilihat dari kandungan energi. Faktor itu antara lain tipe daerah (sudah dibahas), pendidikan istri kepala rumahtangga, pendidikan kepala rumahtangga, dan status sosial-ekonomi. Seperti tampak pada Tabel 5.4, asupan energi lebih tinggi di daerah pedesaan, lebih tinggi bagi penduduk yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat pendidikan istri atau kepala rumahtangga yang lebih tinggi, serta bagi mereka yang berasal dari rumahtangga yang berstatus sosial ekonomi (diukur dari kelas pengeluaran rumahtangga) yang lebih tinggi.

Membandingkan angka-angka asupan energi dan status gizi balita memperlihatkan bahwa korelasi antara keduanya ternyata sangat lemah (jika ada)<sup>5</sup>. Artinya, wilayah yang memiliki prevalensi gizi kurang atau sangat kurang yang tinggi belum tentu memiliki prevalensi balita bergizi kurang atau buruk yang tinggi pula. Kasus Jawa Tengah, misalnya, menunjukkan hal itu sebagaimana

---

<sup>3</sup> Peta Gizi dihitung berdasarkan suatu model pemetaan kemiskinan (*Poverty Map*) yang memanfaatkan kekuatan data survei yang menyajikan data dasar penduduk/rumahtangga secara rinci dan kekuatan data sensus penduduk yang menyediakan data sampai pada unit administrasi terkecil (desa). Model ini memungkinkan diperolehnya estimasi angka kemiskinan atau status gizi sampai tingkat desa.

<sup>4</sup> Hal ini terlihat dari korelasi Pearson, Spearman dan Kendall di antara kedua indikator itu yaitu masing-masing 0.956, 0.883 dan 0.760. Keseluruhan angka itu menunjukkan adanya korelasi kuat sekalipun tidak sempurna.

<sup>5</sup> Sangat lemahnya hubungan itu terlihat dari koefisien regresi dan angka determinasi regresi yang masing-masing sangat kecil, mendekati angka nol.

ditunjukkan oleh Gambar 5.3. Pada gambar itu dipeta-silangkan prevalensi penduduk dengan asupan energi sangat kurang dan prevalensi balita berstatus gizi buruk pada tingkat kecamatan (diambil dari Peta Gizi).

Asupan energi ternyata tidak terkait dengan kemiskinan sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 5.4 (diambil dari Peta Gizi). Gambar itu menyajikan peta hasil tabulasi silang antara proporsi penduduk miskin dan proporsi penduduk dengan asupan energi sangat kurang untuk kasus kecamatan di Jawa Timur. Peta itu menegaskan sangat lemahnya (jika ada) hubungan antara keduanya<sup>6</sup>.

Tabel 5.1: Asupan Energi (*energy intake*)  
Per Kapita/Hari, 2002  
(kkal)

Ukuran	Total	Kota	Pedesaan
Tidak Tertimbang	1,983.5	1,955.4	2,007.0
Tertimbang:			
Umur (*)	3,524.9	3,468.6	3,572.0
Umur dan Jenis Kelamin (**)	2,331.3	2,281.1	2,373.2

Sumber: Dihitung dari Susenas Modul 2002

Catatan:

(\*) Menggunakan skala *Standardized-OECD*

(\*\*) Menggunakan skala Amsterdam

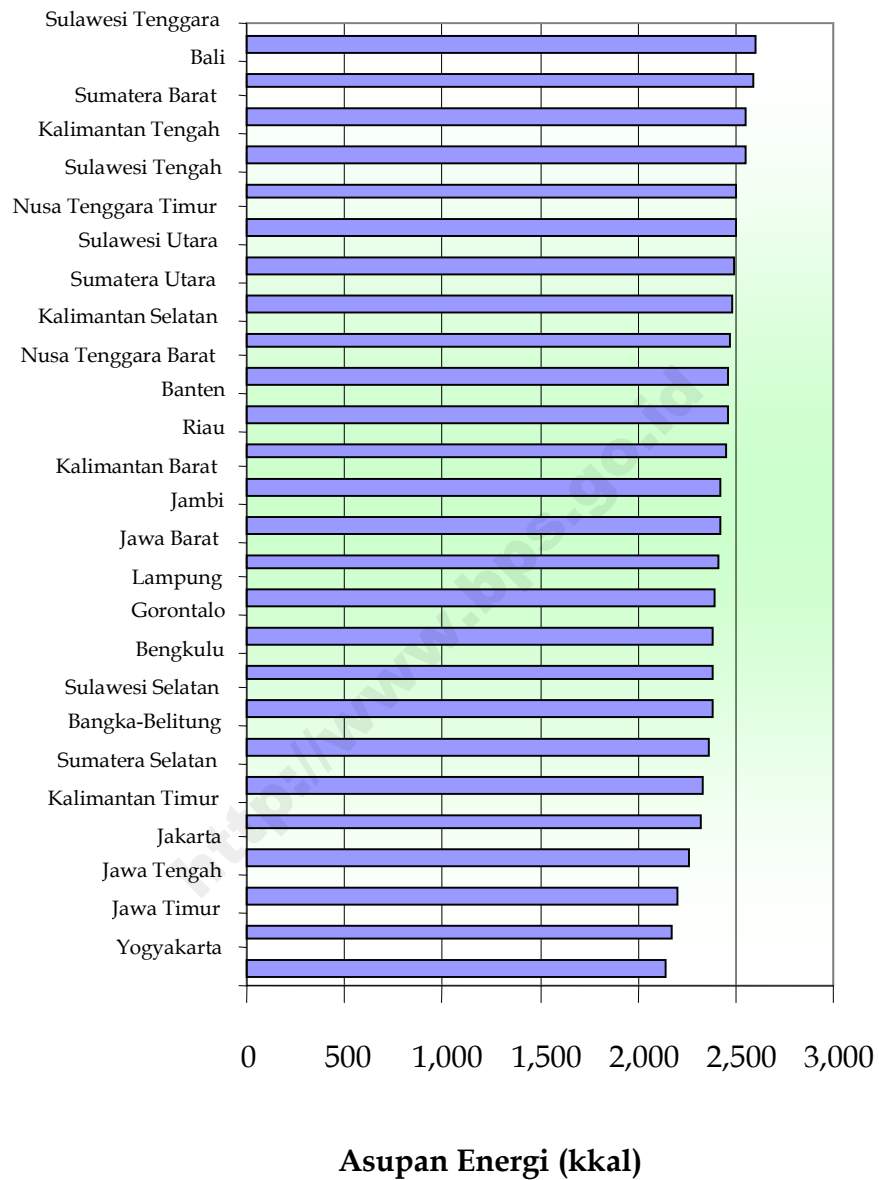
<sup>6</sup> Angka R<sup>2</sup> yang hanya sekitar 5 persen menegaskan lemahnya hubungan itu.

Tabel 5.2: Asupan Energi Per Kapita/Hari Menurut  
Provinsi dan Tipe Daerah, 2002  
(Tertimbang Umur dan Jenis-Kelamin)  
(kkal)

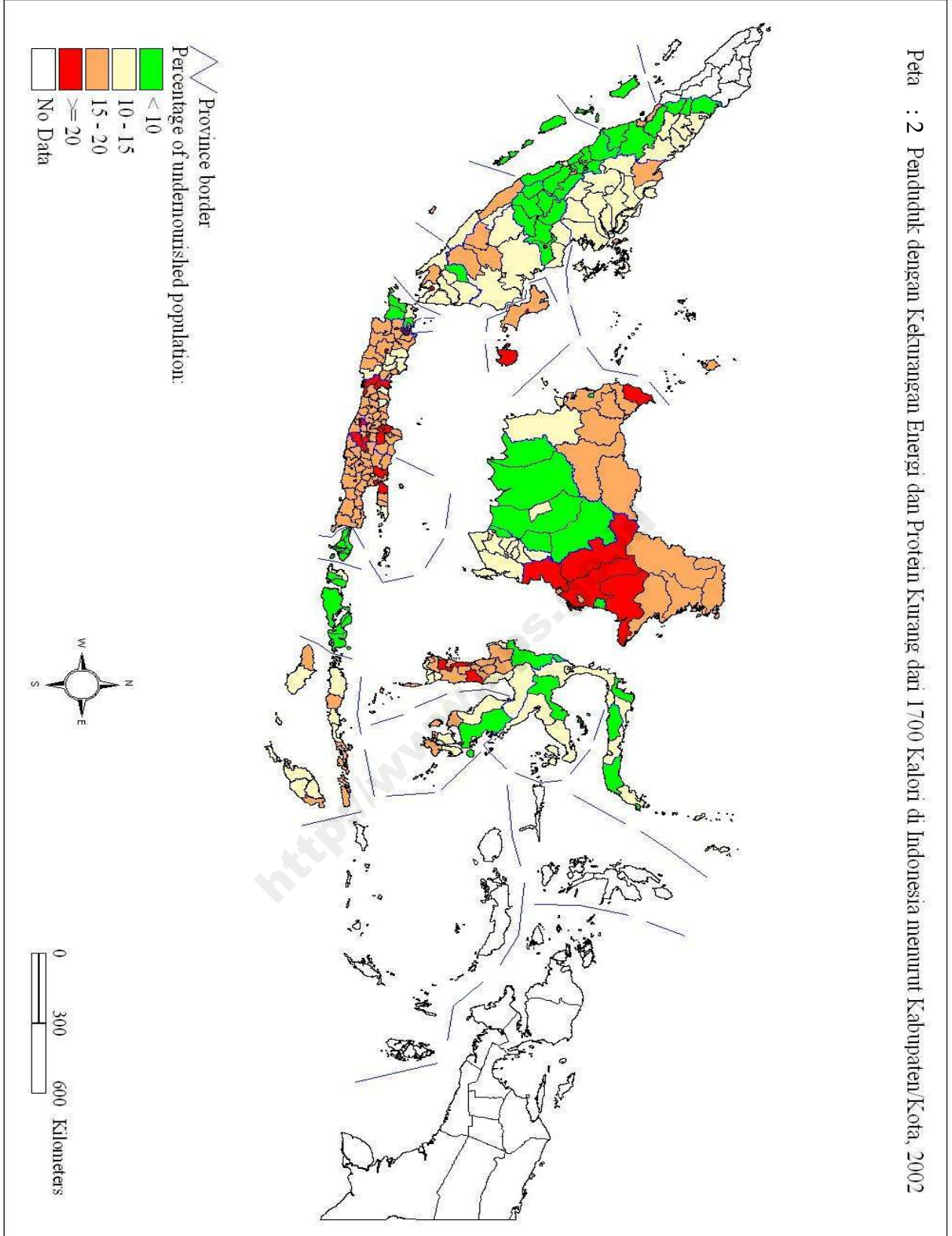
Propinsi	Total	Kota	Pedesaan
Sumatera Utara	2,477.4	2,345.6	2,582.1
Sumatera Barat	2,548.3	2,457.6	2,600.4
Riau	2,455.4	2,438.2	2,471.5
Jambi	2,418.4	2,192.0	2,532.9
Sumatera Selatan	2,329.3	2,255.7	2,360.5
Bengkulu	2,379.9	2,295.3	2,429.6
Lampung	2,394.9	2,192.5	2,461.2
Bangka-Belitung	2,357.8	2,415.3	2,315.8
Jakarta	2,261.2	2,261.2	...
Jawa Barat	2,413.2	2,365.1	2,465.8
Jawa Tengah	2,205.5	2,167.8	2,233.4
Yogyakarta	2,142.9	2,086.6	2,231.8
Jawa Timur	2,170.5	2,152.7	2,183.7
Banten	2,456.9	2,409.8	2,508.7
Bali	2,589.6	2,540.1	2,647.0
Nusa Tenggara Barat	2,463.0	2,419.3	2,496.3
Nusa Tenggara Timur	2,499.9	2,416.4	2,519.6
Kalimantan Barat	2,424.0	2,230.8	2,486.0
Kalimantan Tengah	2,547.1	2,381.4	2,665.3
Kalimantan Selatan	2,469.7	2,387.0	2,518.8
Kalimantan Timur	2,325.7	2,391.9	2,218.6
Sulawesi Utara	2,491.3	2,600.8	2,441.9
Sulawesi Tengah	2,501.9	2,242.6	2,584.9
Sulawesi Selatan	2,379.6	2,416.6	2,364.5
Sulawesi Tenggara	2,603.8	2,484.1	2,635.2
Gorontalo	2,381.1	2,375.1	2,384.1
Total	2,331.3	2,281.1	2,373.2



**Gambar 5.1: Asupan Energi Per Kapita/Hari, 2002**



Peta : 2 Penduduk dengan Kekurangan Energi dan Protein Kurang dari 1700 Kalori di Indonesia menurut Kabupaten/Kota, 2002



Tabel 5.3: Persentase Penduduk Dengan Asupan Energi Kurang dan Sangat Kurang, 2002

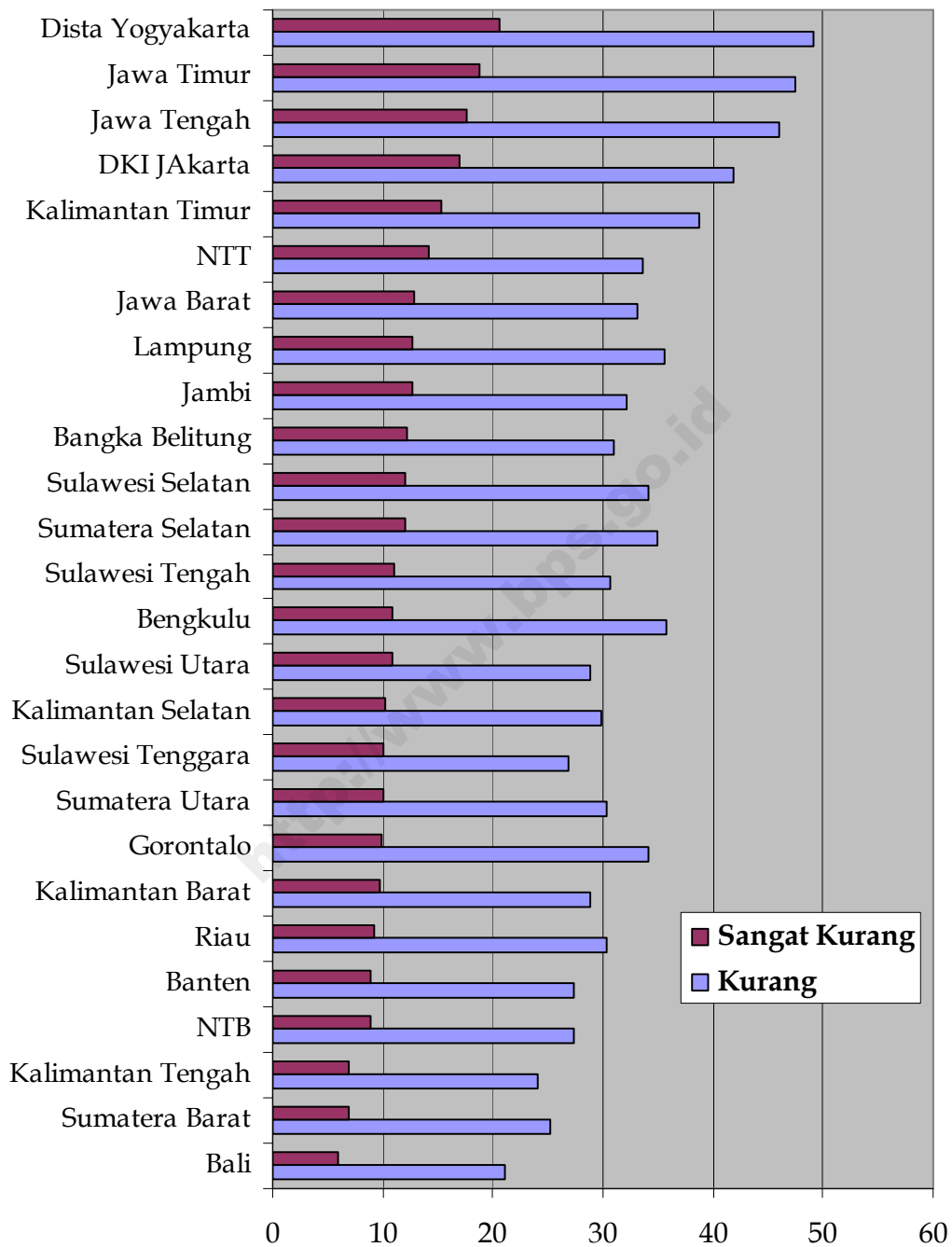
Propinsi	Kurang	Sangat Kurang
Sumatera Utara	30.4	10.1
Sumatera Barat	25.2	6.9
Riau	30.4	9.2
Jambi	32.2	12.6
Sumatera Selatan	34.9	12.0
Bengkulu	35.8	10.9
Lampung	35.6	12.8
Bangka Belitung	31.0	12.3
DKI Jakarta	41.8	16.9
Jawa Barat	33.2	12.8
Jawa Tengah	46.0	17.6
Dista Yogyakarta	49.2	20.6
Jawa Timur	47.5	18.8
Banten	27.3	8.9
Bali	21.1	5.9
NTB	27.3	8.9
NTT	33.7	14.2
Kalimantan Barat	28.8	9.8
Kalimantan Tengah	24.1	6.9
Kalimantan Selatan	29.9	10.3
Kalimantan Timur	38.8	15.3
Sulawesi Utara	28.9	10.9
Sulawesi Tengah	30.6	11.0
Sulawesi Selatan	34.2	12.1
Sulawesi Tenggara	26.9	10.1
Gorontalo	34.2	10.0
Total	37.4	14.1

Sumber: Dihitung dari Susenas 2002

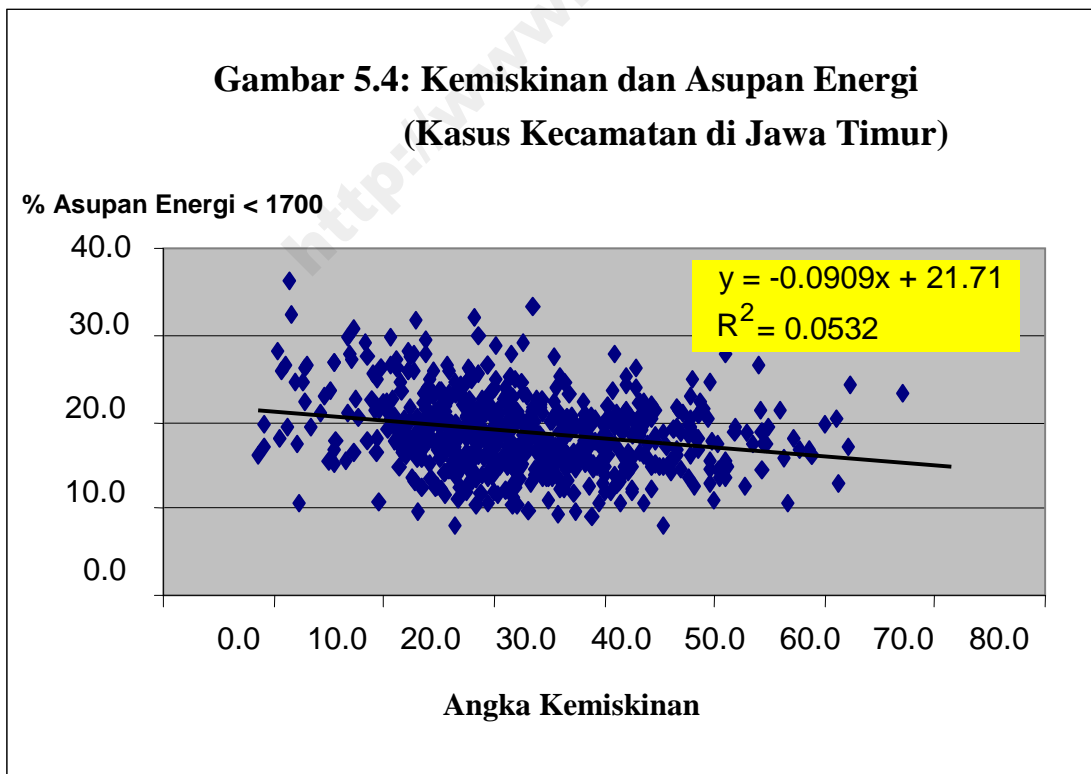
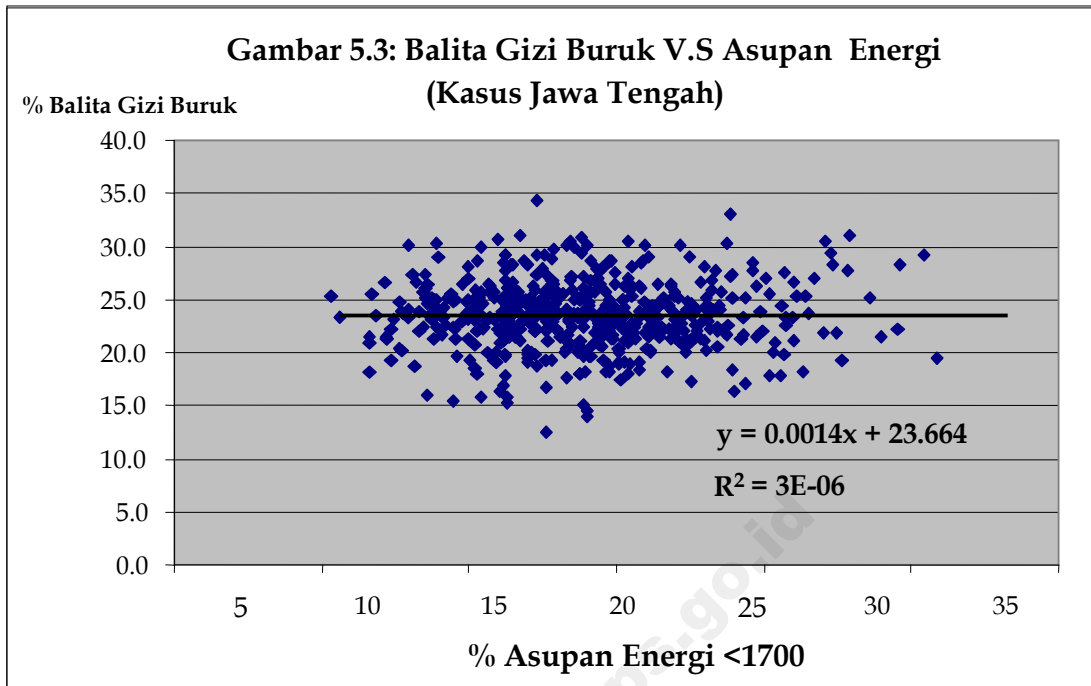
Catatan:

Kurang: < 2,100 kkal/hari;  
 Sangat kurang: < 1,700 kkal per hari  
 (Tertimbang Umur dan Jenis Kelamin)

**Gambar 5.2: % Penduduk Dengan Asupan Energi Kurang dan Sangat Kurang, 2002**



Sumber: Dihitung dari Susenas 2002



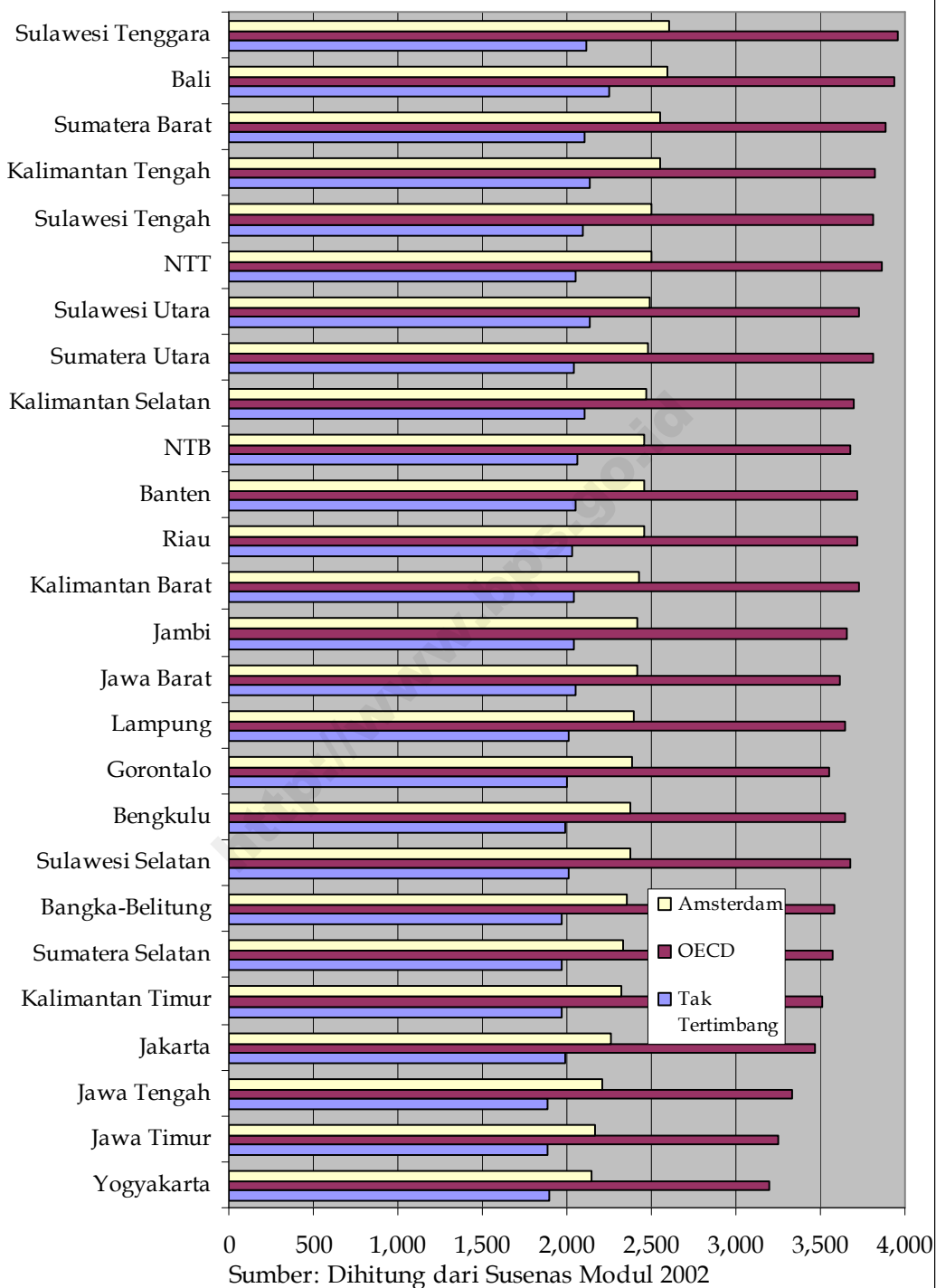
Tabel 5.4  
Asupan Energi Per Kapita/Hari menurut  
Beberapa Karakteristik Sosial Ekonomi (Kasus Jawa Timur)  
(kkal)

	Rata-rata	Perbedaan dari rata-rata umum
<u>Rata-rata Umum</u>	2,171.3	0
<u>Tipe Daerah:</u>		
Kota	2,156.4	-14.9
Pedesaan	2,182.6	11.3
<u>Pendidikan Istri Kepala Rumahtangga:</u>		
<SD	2,108.3	-63
SD	2,184.7	13.4
SLTP	2,239.7	68.4
SLA	2,263.8	92.5
SLA+	2,354.8	183.5
<u>Pendidikan Kepala Rumahtangga:</u>		
<SD	2,106.1	-65.2
SD	2,178.5	7.2
SLTP	2,196.0	24.7
SLA	2,263.2	91.9
SLA+	2,354.8	183.5
<u>Pengeluaran Ruumahtangga:</u>		
40% terendah	1,942.0	-229.3
40% menengah	2,280.5	109.2
20% atas	2,511.7	340.4

Sumber: Diolah dari Susenas 2002

Catatan: Asupan energi (energy intake) dihitung setelah mempertimbangkan komposisi umur-jenis kelamin anggota rumahtangga

**Gambar Lampiran 1: Asupan Eenergi Per Kapita/Hari, 2002  
(dalam Kilo Kalori)**



<http://www.bps.go.id>



## **Bab Enam**

### **Kesimpulan**

Laporan ini menyajikan profil gizi penduduk Indonesia berdasarkan berbagai sumber data yang tersedia khususnya Susenas, suatu survei rumah tangga yang secara berkala diselenggarakan oleh BPS. Latar belakang penyiapan Laporan adalah fakta sederhana bahwa di Indonesia masih terdapat masalah gizi, dan bahkan kasus-kasus kekurangan gizi akut (busung lapar). Walaupun demikian, informasi mendasar seperti besarnya masalah itu dan sebarannya antar wilayah, sejauh ini belum tersedia. Laporan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan itu. Uraian lebih rinci mengenai latar belakang disajikan pada Bab Satu Laporan ini. Bab itu juga menjelaskan ruang lingkup isu yang dicakup dalam Laporan: ketersediaan sumber makanan pokok yang tersedia untuk konsumsi masyarakat, status gizi balita, dan kecukupan asupan energi, masing-masing disajikan pada bab-bab tiga, empat dan lima. Aspek metodologi, termasuk sumber data dan masalah pengukuran status gizi, disajikan pada Bab Dua. Bab Enam ini merangkum diskusi bab-bab sebelumnya dan menyinggung secara singkat beberapa isu kebijakan umum yang relevan.

#### 6.1 Ketersediaan Sumber Gizi

Evaluasi data Neraca Bahanan Makanan (NBM) mengindikasikan bahwa secara keseluruhan beras, sebagai sumber utama konsumsi makanan pokok masyarakat berasal dari produksi dalam negeri. Sumber persediaan beras dalam negeri untuk keperluan konsumsi masyarakat yang berasal dari impor porsinya relatif kecil. Walaupun demikian, perbandingan antar tahun mengindikasikan kecenderungan meningkatnya komponen impor. Di sisi lain, produksi beras dalam negeri sukar untuk dikatakan meningkat (apalagi jika dikaitkan dengan penambahan penduduk). Hal ini mungkin sedikit banyak terkait dengan kebijakan impor beras yang tampaknya kurang kondusif bagi masyarakat petani untuk menanam padi secara optimal.

Peranan beras terhadap penyediaan sumber gizi masyarakat sangat besar. Peranan besarnya tidak hanya dalam hal penyediaan sumber energi tetapi juga sumber protein. Pada tahun 2002, beras menyumbang sekitar 47.2 persen sumber energi dan 45.8 persen sumber protein. Besarnya angka pertama mengindikasikan

masih rendahnya diversifikasi tanaman makanan pokok; angka kedua mencerminkan masih sangat rendahnya sumber protein hewani untuk konsumsi makanan masyarakat Indonesia. Diversifikasi tanaman sebagai sumber bahan makanan pokok dan penyediaan sumber protein hewani agaknya patut diagendakan di masa depan untuk dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan status gizi masyarakat.

Evaluasi data NBM juga mengindikasikan bahwa di dalam negeri sebenarnya tersedia sumber makanan dengan kandungan zat gizi, khususnya, energi, dalam jumlah yang memadai. Tahun 2002, misalnya, tersedia sumber energi sekitar 3,000 kkal per kapita per hari, 1,000 kkal lebih tinggi dari angka acuan kecukupan energi seseorang.

## 6.2 Status Gizi Balita

Status gizi masyarakat Indonesia, dilihat dari status gizi balita yang dihitung berdasarkan pendekatan antropometri masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari relatif besarnya proporsi balita yang berstatus gizi kurang bahkan buruk. Pada tahun 2003, misalnya, proporsi balita yang bergizi kurang 19.7 persen dan yang bergizi buruk 8.9 persen. Status gizi balita lebih tinggi di daerah perkotaan dari pada di pedesaan. Pada tahun 2003, proporsi balita bergizi kurang 18.2 persen di daerah perkotaan dan 20.7 persen di daerah pedesaan.

Perbandingan antar tahun menunjukkan bahwa status gizi balita meningkat dari tahun 2001 ke tahun 2002, tetapi tahun berikutnya kembali menurun. Proporsi yang berstatus gizi kurang dan buruk ( $Zscore < -2$ ) pada tahun 2001, 2002 dan 2003 masing-masing 26.6, 25.8 dan 28.7 persen. Pola itu berlaku hampir di semua provinsi.

Perbandingan antar provinsi pada tahun 2003 menunjukkan bahwa status gizi balita bervariasi antar provinsi. Proporsi balita yang bergizi kurang dan buruk memiliki rentang antara 16.6 persen untuk provinsi Bali dan 46.2 persen untuk provinsi Gorontalo. Status gizi balita terkait dengan kemiskinan walaupun yang terakhir ini bukan satu-satunya faktor berpengaruh.

## 6.3 Asupan energi

Secara rata-rata, penduduk Indonesia telah memenuhi asupan energi minimal yang diperlukan. Asupan energi per kapita per hari pada tahun 2002,

misalnya, sekitar 2,300 kkal, sekitar 200 kkal lebih tinggi dari angka kebutuhan normal. Angka 2,300 itu diperoleh setelah mempertimbangkan komposisi umur dan jenis kelamin penduduk Indonesia. Perbandingan antar tipe daerah menunjukkan angka asupan yang lebih tinggi di daerah pedesaan dari pada di daerah perkotaan. Pada tahun 2002, misalnya, asupan energi per kapita sekitar 2,281 kkal di daerah perkotaan dan 2,373 kkal di pedesaan.

Angka-angka yang baru saja disinggung sama sekali tidak mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah terbebas dari masalah kurang gizi. Yang terjadi justru sebaliknya karena masih relatif tinggi prevalensi penduduk yang bergizi kurang (asupan energi kurang dari 2,100 kkal) atau bahkan sangat kurang (kurang dari 1,700 kkal). Pada tahun 2002 sekitar 37.4 persen penduduk yang bergizi kurang dan 14.1 persen bergizi sangat kurang.

Prevalensi penduduk kurang gizi bervariasi antar wilayah. Pada tahun 2002 rentang proporsi bergizi sangat kurang terletak antara 5.9 persen untuk provinsi Bali dan 20.6 persen untuk provinsi Dista Yogyakarta. Perbandingan antar tipe daerah maupun wilayah tampaknya perlu diinterpretasikan secara kritis karena ada indikasi bahwa pencatatan kandungan energi yang berasal dari konsumsi makanan jadi kurang memadai.

Prevalensi kurang gizi terkait dengan berbagai faktor sosial-ekonomi. Secara umum, prevalensi cenderung lebih rendah bagi penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, asupan energi sekitar 1,900 kkal bagi rumah tangga berpendapatan paling rendah (40 persen terendah) dan sekitar 2,500 kkal bagi yang berpendapatan paling tinggi (20 persen teratas).

Asupan energi ternyata tidak berkorelasi dengan status gizi balita. Paling tidak ada dua implikasi yang dapat diturunkan dari fakta ini. Pertama, kedua indikator itu mengukur dua aspek gizi yang berbeda. Ini berarti antara keduanya tidak dapat saling menggantikan. Kedua, upaya meningkatkan status gizi balita (yang dalam keadaan ekstrim termanifestasi dalam bentuk busung lapar) dengan meningkatkan pasokan pangan atau meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh makanan pokok (sebagai sumber energi) tidak memadai. Status gizi balita mencerminkan keadaan lebih kompleks dari sekedar kecukupan gizi secara umum dalam rumah tangga.

<http://www.bps.go.id>

# **TABEL-TABEL LAMPIRAN**

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Tabel L-1  
Distribusi Persentase Balita Menurut Status Gizi  
2001

	Buruk	Kurang	Cukup	Lebih	Total
Sumatera utara	7.3	20.0	68.4	4.3	100.0
Sumatera Barat	3.9	18.3	75.1	2.7	100.0
Riau	5.1	23.8	69.3	1.8	100.0
Jambi	8.2	16.4	71.6	3.9	100.0
Sumatera Selatan	9.0	19.7	69.3	2.1	100.0
Bengkulu	5.9	12.3	72.6	9.3	100.0
Lampung	8.2	16.5	69.8	5.6	100.0
Bangka Belitung	6.4	19.2	72.3	2.1	100.0
DKI Jakarta	5.4	13.8	73.3	7.5	100.0
Jawa Barat	3.5	17.0	77.6	2.0	100.0
Jawa Tengah	4.7	19.1	74.0	2.3	100.0
Yogyakarta	3.1	17.6	77.0	2.4	100.0
Jawa Timur	5.7	19.7	72.5	2.1	100.0
Banten	7.8	19.8	71.0	1.5	100.0
Bali	2.5	13.2	82.0	2.3	100.0
Nusa Tenggara Barat	8.4	23.3	67.3	0.9	100.0
Nusa Tenggara Timur	11.1	24.4	61.0	3.6	100.0
Kalimantan Barat	9.9	24.6	64.3	1.3	100.0
Kalimantan Tengah	18.8	18.4	62.8		100.0
Kalimantan Selatan	5.7	24.5	67.7	2.2	100.0
Kalimantan Timur	5.6	17.9	74.0	2.6	100.0
Sulawesi Utara	20.5	21.4	55.6	2.6	100.0
Sulawesi Tengah	7.1	24.4	64.7	3.8	100.0
Sulawesi Selatan	10.2	25.3	60.7	3.8	100.0
Sulawesi Tenggara	5.7	22.4	68.5	3.5	100.0
Gorontalo	17.6	16.2	62.2	4.1	100.0
Indonesia	6.8	19.8	70.6	2.8	100.0

Sumber: Diolah dari Susenas 2001

Tabel L-2  
Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi  
2002

	Buruk	Kurang	Cukup	Lebih	Total
Sumatera utara	12.3	20.7	65.1	1.8	100.0
Sumatera Barat	8.6	19.5	70.5	1.4	100.0
Riau	4.6	13.8	78.7	2.8	100.0
Jambi	6.5	18.6	73.5	1.5	100.0
Sumatera Selatan	10.1	18.2	69.5	2.3	100.0
Bengkulu	7.6	18.8	70.3	3.3	100.0
Lampung	7.6	16.1	74.3	2.0	100.0
Bangka Belitung	5.7	15.4	75.7	3.2	100.0
DKI Jakarta	8.1	15.0	71.6	5.2	100.0
Jawa Barat	5.4	16.1	75.8	2.7	100.0
Jawa Tengah	6.1	18.9	73.1	1.9	100.0
Yogyakarta	2.1	14.8	81.4	1.7	100.0
Jawa Timur	6.8	18.7	72.7	1.8	100.0
Banten	4.7	15.8	76.8	2.7	100.0
Bali	4.5	14.2	78.0	3.3	100.0
Nusa Tenggara Barat	13.1	24.7	60.7	1.6	100.0
Nusa Tenggara Timur	12.3	26.5	59.6	1.6	100.0
Kalimantan Barat	11.8	21.4	64.6	2.3	100.0
Kalimantan Tengah	13.6	18.3	65.1	3.0	100.0
Kalimantan Selatan	8.1	22.1	66.5	3.3	100.0
Kalimantan Timur	6.4	15.2	74.9	3.6	100.0
Sulawesi Utara	6.9	15.0	74.7	3.4	100.0
Sulawesi Tengah	9.1	20.5	68.4	2.0	100.0
Sulawesi Selatan	8.6	20.5	68.6	2.3	100.0
Sulawesi Tenggara	8.8	19.5	70.1	1.5	100.0
Gorontalo	15.3	26.7	56.5	1.6	100.0
Indonesia	7.5	18.3	71.9	2.3	100.0

Sumber: Diolah dari Susenas



Tabel L-3  
Distribusi Persentase Balita menurut Status Gizi  
2003

	Buruk	Kurang	Cukup	Lebih	Total
Sumatera utara	13.0	18.8	65.4	2.8	100.0
Sumatera Barat	7.6	18.6	72.4	1.4	100.0
Riau	11.3	18.1	68.5	2.2	100.0
Jambi	3.1	19.0	76.0	2.0	100.0
Sumatera Selatan	11.0	20.3	65.3	3.4	100.0
Bengkulu	8.1	18.9	70.4	2.6	100.0
Lampung	8.2	21.7	67.8	2.3	100.0
Bangka Belitung	9.7	20.9	65.6	3.8	100.0
DKI Jakarta	6.5	16.8	71.0	5.7	100.0
Jawa Barat	5.8	18.7	72.3	3.2	100.0
Jawa Tengah	6.3	19.7	72.2	1.8	100.0
Yogyakarta	4.0	13.4	79.6	3.0	100.0
Jawa Timur	6.2	17.7	73.8	2.3	100.0
Banten	9.0	18.7	69.8	2.6	100.0
Bali	3.6	12.9	80.0	3.5	100.0
Nusa Tenggara Barat	11.0	23.6	63.1	2.3	100.0
Nusa Tenggara Timur	13.0	26.3	59.3	1.4	100.0
Kalimantan Barat	14.3	25.1	59.0	1.7	100.0
Kalimantan Tengah	9.8	19.5	67.3	3.5	100.0
Kalimantan Selatan	10.1	23.0	64.1	2.9	100.0
Kalimantan Timur	9.4	18.0	71.7	0.9	100.0
Sulawesi Utara	10.5	16.0	69.1	4.4	100.0
Sulawesi Tengah	10.2	21.9	64.2	3.8	100.0
Sulawesi Selatan	10.3	21.1	67.1	1.4	100.0
Sulawesi Tenggara	6.1	16.9	73.8	3.2	100.0
Gorontalo	21.9	24.3	51.9	1.9	100.0
Maluku	9.2	21.3	68.7	0.9	100.0
Maluku utara	11.1	16.1	63.8	9.0	100.0
Papua	16.8	16.6	61.3	5.3	100.0
Indonesia	8.9	19.7	68.9	2.5	100.0

Sumber: Diolah dari Susenas 2003

## Referensi

Vijay,

1994 "*Measuring the degree of poverty in a dynamic and comparative context*"  
(Mimeo)

Ritonga, Hamonangan

1994 "*The impact of household characteristics on household composition behavior: a demand system analysis on the consumption behavior of urban household in the provinces of Java, Indonesia*", A dissertation submitted for PhD, IOWA State University (October)

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

**BPS**

**Badan Pusat Statistik**

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telepon : 3841195, 3842508, 3810291 5

Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385

Fax : 3857046, E-mail : [bps@bps.go.id](mailto:bps@bps.go.id)

Homepage : <http://www.bps.go.id>